FENOMENA PENGEMIS DALAM PERSPEKTIF KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Sosiologi

OLEH

SELA AFRIKA DIANA
NIM : 1805905020015

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
KAMPUS UTU MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : sosiologi.utu.ac.id E-mail : sosiologi@utu.ac.id

Meulaboh, 29 November 2021

Program Studi : Sosiologi
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : SELA AFRIKA DIANA
NIM : 1805905020015

Dengan judul : FENOMENA PENGEMIS DALAM PERSPEKTIF KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:
Pembimbing Utama,

Adam Sani, M.H
NIDN.0021018702

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Basri, SH., MH
NIP.196307131991021002

Ketua
Program Studi Sosiologi,

Nurkhalis, S.Sos.I., M.Sosio
NIP.198806062019031014

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
KAMPUS UTU MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : sosiologi.utu.ac.id E-mail : sosiologi@utu.ac.id

Meulaboh, 29 November 2021

Program Studi : Sosiologi
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : SELA AFRIKA DIANA
NIM : 1805905020047

Dengan judul : FENOMENA PENGEMIS DALAM PERSPEKTIF KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada Tanggal 29 November 2021 dan memenuhi syarat untuk diterima.

Menyetujui,
Komisi Ujian

			Tanda Tangan
1.	Ketua	: Adam Sani, M.H	.....
2.	Anggota	: Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si	.....
3.	Anggota	: Dr. Mursyidin, MA	.....

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sosiologi

Nurkhalis, S.Sos.I., M.Sosio
NIP.198806062019031014

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sela Afrika Diana

NIM : 1805905020015

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 29 November 2021

Saya yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

9C486AJX579300161

SELA AFRIKA DIANA

NIM 1805905020015

Dipindai dengan CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah saya ucapkan pada Allah SWT, atas segala rahmat, karunia dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi dan segala kekurangannya. Sujut syukur saya ucapkan kepada-MU ya rabb, karena telah menghadiahkan orang-orang yang berarti disekelilingku. Yang selalu memberi semangat dan do'a sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya sederhana saya persembahkan untuk orang tua saya.

Ayahanda (Afrijal) & ibunda tercinta (Iruana)

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum dapat membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terimakasih atas segala do'a dan dukungan kalian baik dalam bentuk materi maupun dukungan moral. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggagapai cita-cita, semoga disayangi Allah sebagai mana menyayangiku

Adik-adik dan keluarga terdekat

Sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya sederhana ini untuk adik-adik tersayang dan semua keluarga yang telah memberi semangat dan inpirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dosen pembimbing

Kepada Bapak Adam Sani, M.H selaku pembimbing saya yang paling baik dan bijaksana, terima kasih karna telah menjadi orang tua kedua bagi saya di kampus, terima kasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmu selama ini yang sudah dilimpahkan kepada saya dengan rasa tulus dan ikhlas. Dan juga kepada bapak Dr. Afrizal, M. Si dan Dr. Mursyidin, MA yang telah menguji demi sempurnanya skripsi saya.

Teman-Teman.

Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi demi kelancaran penulisan skripsi ini. Dan khususnya angkatan 2018 Sosiologi tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja mohon maaf jika banyak salah dengan kata-kata ataupun prilaku saya selama ini yang menyinggung atau menyakiti perasaan teman-teman semua, terimakasih untuk support yang luar biasa,
sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sela Afrika Diana

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama	: Sela Afrika Diana
NIM	: 1805905020015
Tempat/Tanggal Lahir	: Kuta Padang, 27 November 1999
Agama	: Islam
No. HandPhone	: 082276290812
Alamat	: Desa Kuta Padang, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue

B. Biodata Orang Tua Wali

Nama Ayah	: Afrijal
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Desa Kuta Padang, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue
Nama Ibu	: Iruana
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Kuta Padang, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue

C. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar	: SD Negeri 7 Simeulue Tengah
Sekolah Menengah Pertama	: SMP Negeri 1 Simeulue Cut
Sekolah Menengah Atas	: SMA Negeri 1 Simeulue Cut

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nya, masih diberikan nikmat kesehatan untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi.Shalawat beriring salam tak terlupa pula penulis sanjungkan kepada baginda Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke zaman yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini berjudul **"Fenomena Pengemis Dalam Perspektif Kehidupan Sosial Masyarakat Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat"**. Sebagai salah satu pemenuhan syarat agar dapat menyelesaikan studi dan untuk memenuhi gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan hati menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sangat besar kepada segala pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.Ungkapan terimakasih terutama kepada:

1. Kedua Orang Tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta kasih penulis persembahkan kepada Ayahanda Afrijal dan Ibunda Iruana, telah memberikan segala bentuk pengorban, berjuang, nasehat, kasih sayang yang tiada hentinya serta do'a yang penuh ketulusan demi kesuksesan dan keberhasilan penulis.
2. Bapak Adam Sani M.H, selaku dosen pembimbing yang sangat penulis sanjungkan dan banggakan yang mana telah menjadi orang tua kedua yang membimbing, menasehati, memotivasi, memberikan arahan serta besedia meluangkan waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.

3. Bapak Prof. Dr Jasman J Ma'ruf, SE.MBA., selaku Rektor Universitas Teuku Umar
4. Bapak Basri, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
5. Bapak Nurkhalis, S.Sos.I.,M.Sosio dan Ibu Yeni Sri Lestari, S.IP,M.Soc.Sc selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
6. Bapak Dr.Afrizal Tjoetra, M.Si dan Bapak Dr.Mursyidin, MA selaku penguji yang telah memberikan arahan dan saran atau masukan terhadap skripsi
7. Untuk Saudaraku yang tersayang dan penuh cinta kasih kepada Cut Sartika, Fengki Lovenia, Sekar Farma Juanda, Aja Dela Hikmah, Seli Afridayanti, Maisura atas segala pengorbanan baik tenaga dan motivasi.
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, terkhususnya jurusan Sosiologi Angkatan 2018 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan.

Akhirnya, terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis.Dengan ini, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat.

Meulaboh, 20 September 2021

Penulis,

(Sela Afrika Diana)

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

ABSTRACT

The existence of beggars in Meulaboh City causes unrest and discomfort for the wider community, this is because beggars often ask for it by force and also dramatize their appearance. This study uses the concept of phenomenology to see how the views of the people in Meulaboh City regarding the number of beggars who beg in public places.

The results showed that the people in Meulaboh City had taken the presence of beggars as normal, but the community regretted that many beggars lied about their lives and even brought small children as a tool to get compassion from the community. beggars and provide training. The community should not give donations to beggars so that beggars cannot take advantage of the community's compassion and the West Aceh government should be more firm in taking action against unscrupulous beggars who still do not obey the rules to be rehabilitated by the government.

Keywords: Phenomenon, Beggar, Social Life, Community

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

ABSTRAK

Keberadaan pengemis di Kota Meulaboh menyebabkan terjadinya keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat luas, hal ini dikarenakan pengemis seringkali meminta dengan cara memaksa dan juga mendramatisir penampilannya. Kajian ini menggunakan konsep fenomenologi untuk melihat bagaimana pandangan masyarakat di Kota Meulaboh tentang banyaknya pengemis yang meminta-minta di tempat umum.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan penjelasan mengenai fenomena pengemis dalam perspektif masyarakat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat di Kota Meulaboh sudah menganggap biasa kehadiran para pengemis, namun masyarakat menyayangkan karena banyak pengemis yang berbohong mengenai kehidupan mereka bahkan membawa anak kecil sebagai alat untuk mendapat belas kasih dari masyarakat.Sedangkan upaya dari pemerintah Aceh Barat sudah melakukan rehabilitasi terhadap para pengemis dan memberikan pelatihan. Seharusnya masyarakat tidak memberikan sumbangan ke pengemis agar pengemis tidak dapat mengambil keuntungan dari rasa iba masyarakat dan pemerintah Aceh Barat harus lebih tegas dalam menindak oknum pengemis yang masih tidak taat aturan untuk direhabilitasi oleh pemerintah.

Kata Kunci : Fenomena, Pengemis, Kehidupan sosial, Masyarakat

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **i**
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN ..... **ii**
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
LEMBARAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
DAFTAR RIWAYAR HIDUP ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRACT ..... **viii**
ABSTRAK ..... ***ix***
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.4.1 Manfaat Teoritis 5
1.4.2 Manfaat Praktis 6
1.5 Sistematika Pembahasan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
2.1 Penelitian Terdahulu 8
2.2Fenomena Pengemis 11
2.2.1 Pengertian Pengemis 11
2.2.2Aturan-aturan Pemerintah tentang Pengemis 14
2.3 Kehidupan Sosial 19
2.3.1 Definisi Kehidupan Sosial 19
2.3.2 Bentuk-Bentuk Kehidupan Sosial 21
2.4 Teori Fenomenologi 22

BAB III METODE PENELITIAN **28**
3.1 Metode dan Pendekatam Penelitian 28
3.2 Sumber Data 29
3.2.1 Data Primer 29
3.2.2 Data Sekunder 29
3.3 Teknik Penentuan Data 29

3.4 Teknik Penentuan Informan 30
3.5 Instrumen Penelitian 31
3.6 Teknik Analisis Data 31
3.7 Pengujian Kredibilitas 32
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian 33

BAB IV HASIL PENELITIAN 35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 35
4.1.1 Letak Geografis Kota Meulaboh 35
4.1.2 Profil Dinas Sosial 36
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial 42
4.2 Pandangan Masyarakat Terhadap Perilaku Mengemis Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat 43
4.3 Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Pengemis Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat 48

BAB V PEMBAHASAN **55**
5.1 Pandangan Masyarakat Terhadap Perilaku Mengemis Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat 55
5.2 Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Pengemis Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat 57

BAB VI PENUTUP **62**
6.1 Kesimpulan 62
6.2 Saran 64

DAFTARPUSTAKA **66**

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Profil Informan.....30
Tabel 3.8 Jadwal Penelitian.....34
Tabel 4.2.Hasil Wawancara 46
Tabel 4.3 Hasil Wawancara 53

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 :Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 : Surat Izin Wawancara

Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 : SK Pembimbing

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bangsa Indonesia memiliki suatu *problem* terkait dengan kemiskinan, tentunya hal iniseringkali terdengar hingga saat ini belum terealisasi dengan maksimal meskipun telah dibuat beberapa kebijakan-kebijakan, dimana bertujuan untuk memberikan suatu upaya peningkatkanprekonomia, pemenuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pendapatan yang mampu memenuhi kebutuhan dalam masyarakat.

Kemiskinan adalah suatu *problem* yang terjadi dalam masyarakat karenaadanya ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.Masalah kemiskinan inilah yang sampai sekarang masih dicari jalan keluarnya oleh pemerintah,masyarakat berusaha untuk mencari pemenuhan kebutuhan secara instan tanpa harus bekerja keras memperoleh penghasilan. Sehingga, sebagian masyarakat bergantung pada masyarakat yang lainnya (Mujjahidin, Anada 2017:15).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk Indonesia pada tahun 2021 angka kemiskinan mencapai hingga 27,54 juta orang sehingga tingkat kemiskinan 10,48 %.Permasalahan kemiskinan juga terjadi di masyarakat Aceh sebagaimana data, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 menunjukan angka kemiskinan mencapai 834,24 ribu orang atau 15,01 %. Masalah kemiskinan di Aceh belum tertuntaskan dengan baik, meskipun telah dibuat usaha-usaha untuk

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

masyarakat dimana, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup(Badan Pusat Statistik Indesia.go.id).

Kemiskinan ini yang selalu menghantui masyarakat, masyarakat harus berusaha untukbertahan hidup serta mendapatkan dan memperoleh pekerjaan yang mudah, sehingga sebagian masyarakat memilih untuk mengemis.Pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara." Oleh karna itu, parapengemis perlu adanya perhatian khusus dari negara sesuai dengan pasal 34 ayat (1).Pengemis harus dipelihara oleh negara demi kenyamaanan tatanan kehidupan masyarakat.

Perilaku mengemis adalah suatu perilakumenyimpang, penyelewengan dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat,perilaku yang menyimpang atau bertentangan dengan norma tersebut yaitu manusia yang sehat fisik dan mentalnya serta, memiliki kondisi organ tubuh yang sempurna namun berusaha membuat orang lain merasa iba serta kasihan terhadapnya.Kemiskinan merupakan faktor utama dari fenomena mengemis karena kesenjangan sosial yang mempengaruhi masyarkat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perilaku mengemis sering terjadi di daerah perkotaan tidak terpungkiri juga di Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh yang terdapat beberapa masyarakat yang mencari pekerjaan dengan cara mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi ekonomi merupakan penyebab terjadinya perilaku mengemis di Kota Meulaboh.Beberapa faktor dari perilaku mengemis yaitu kurangnya pemenuhan kebutuhan, minimnya tingkat pendidikan, minimnya keterampilan atau *skill*, dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi di era globalisasi.Hal inilah yang menjadi dasar utama dalam perilaku tersebut (Ade 2017:102).

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Pada umumnya para pengemis biasanya ditemui di tempat-tempat umum seperti: SPBU, pasar tradisional, lampu merah, serta minimarket. Fenomena pengemis ini pada dasarnya, bukanlah hal yang baru dalam masyarakat apalagi masyarakat diKota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Kehidupan pengemis dianggap setara dengan masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap seperti, memiliki *Hand Phone*, memiliki Motor serta memiliki rumah dengan fasilitas yang cukup baik.Namun, faktor Pendidikan, faktor kemampuan atau *skill* dan penghasilan yang tidak tetap menyebabkan masyarakat mengemis.

Lapangan pekerjaan yang kurang serta pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat, memaksa masyarakat untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya, dengan mencari pekerjaan yang lebih mudah, dengan cara meminta belas kasihan orang lain.Pada dasarnya perilaku ini juga menganggu tatanan kehidupan dalam masyarakat karena, telah di jelaskan padapasal 34 ayat (1) dimana negara melakukan pembinaan atau rehabilitas untuk pengemis. Kebijakan ini, diharapakan mampu mengurangi angka kemiskinana serta angka pengemis di Indonesia, khusunya juga di Kota Meulaboh.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Fenomena keberadaan pengemis bagi kehidupan sosial masyarakat tentunya akan menghadirkan masalah sosial seperti, mengganggu ketertiban umum, mengganggu pengendara, timbulnya masalah sosial, mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, serta rawan terjadinya kriminalitas. Fenomena pengemis bagi kehidupan sosial masyarakat harus diperhatikan demi terciptanya kenyamanan, keamanan, serta ketertiban tatanan kehidupan masyarakat.

Permasalahan terkait pengemis juga belum adanya tindakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah, untuk melakukan penanggulangan dan bentuk rehabilitasi para pengemis yang berkeliaran di lingkungan masyarakat secara langsung belum terealisasi dengan maksimal.Sehingga para pengemis tidak memiliki efek jera.Larangan mengemis di muka umum belum teratasi dengan baik di Kota Meulaboh Tentunya, hal ini sangat mengganggu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berkendara.

Berdasarkan observasi di lapangan diketahui bahwa para pengemis di Kota Meulaboh bukan masyarakat asli, melainkan migrasi sementara.Para pengemis tinggal sementara di Losmen, Kos, serta perumahan yang di sewakanuntuk tempat tinggal sementara mereka melakukan kegiatan mengemis. Kegiatan mengemis kerap di lakukan di beberapa lokasi seperti, Lampu merah, SPBU, Pasar Tradisional, Indomaret, dan Swalayan, Permasalahan ini harus adanya perhatian yang khusus dari pemerintah untuk mengurangi angka pengemis di Kota Meulaboh, serta adanya upaya pemerintah yang nyata terhadap penanggulangan pengemis.

Berdasakan penjelasan atau uraian diatas yang telah dijabarkan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul " **FenomenaPengemisDalam Perspektif Kehidupan Sosial MasyarakatDi Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat".**

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diambil rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perilaku mengemisdi KotaMeulaboh?
2. Apa upaya pemerintah terhadap penanganan pengemis di Kota Meulaboh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kegiatan mengemis di Kota Meulaboh
2. Untuk mengetahui apaupaya pemerintah terhadap penanganan pengemis di Kota Meulaboh

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, memberikan suatu manfaat baik untuk masyarakat maupun diri sendiri.Adapun manfaat dari hasil penelitian ini di harapkan :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan nantiknya dapat menjadikan suatu sumbangan terhadap penelitian berikutnya serta memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam terkait *problem-problem* kesenjangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat sehingga dapat lebih memperbanyak keilmuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini tentang, masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat terkait dampak pengemis terhadap kehidupan sosial masyarakat diKota Meulaboh maka dapat diperoleh manfaatnya yaitu :

1. Melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap pengemis
2. Melihat bagaimana upaya pemerintah terhadap penanganan pengemis sehingga diharapkan mampu mengurangi angka pegemis dan mampu memberikan kesadaran untuk tidak melakukan kegiatan mengemis.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini maka penulis membagikan tulisan kedalam beberapa bagian yaitu :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penlitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan pustaka dan Landasan Teori, pada bab ini juga membahas tentang penelitian terdahulu, kerangka teori.

BAB III : Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, jadwal penelitian, instrument penelitian, teknik analisis data, uji kredibilitas data.

BAB IV : Hasil penelitian, pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, terkait dengan penelitian serta relevansinya dengan landasan teori sebagai tumpuan.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BAB V : Pembahasan, pada bab ini membahas mengenai deskripsi dari interpretasi data yang diperoleh dari hasil penelitian keseluruhan.

BAB IV : Penutup, pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara menyeluruh dan sarana untuk kedepannya.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terkait penelitian Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Pengemis sebelumya sudah diteliti namun, dengan perspektif yang berbeda maka peneliti mengambil beberepa penelitian terdahulu, sebagai bahan referensi dalam memudahkan penyusunan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfia dan Rahmi, (2018) dengan judul Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Pengemis Dan Penanggulangannya di Kota Banda Aceh.Adapun tujuan dari penelitian ini ialah, untuk mengetahui, seperti apa bentuk kehidupan sosial ekonomi para pengemis di daerah tersebut dan bagaimana bentuk rehabilitas atau upaya yang seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.

Metode yang dipakai peneliti dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan dengan pengolahan data berdasarkan sampelnya dengan cara *Sampling Probability*.Dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji oleh peneliti yaitu, menganalisis kehidupan sosial ekonomi para pengemis dalam masyarakat serta seperti apa penanganan atau penanggulangannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut untuk mengurangi atau mengatasi masalah terkait dengan pengemis tersebut.

Febrina Damayanti, (2016) “Kondisi Sosial Ekonomi Pengemis Dalam Perspektif Teori Darmaturgi (Studi Kasus Di Desa Pangeralang, Kecamatan Kamranjen, Kabupaten Banyumas”. Adapun tujuan dari penelitian ini, untuk membandingkan bentuk ekonomi pengemis dengan masyarakat yang

lainnya.Kemudian tujuan penelitian ini juga, untuk melihat faktor apa yang mendorong masyarakat untuk menjadi pengemis, serta mengetahui asal usul munculnya atau timbulnya pengemis di Desa atau Daerah tersebut.

Metode yang dipakai peneliti dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan dengan pengelolaan data dengan cara *Purposive Sampling.*Dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji oleh peneliti yaitu mengetahui faktor pendorong masyarakat untuk melakukan hal tersebut serta mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi pengemis berdasarkan perspektif teori darmaturgi atau drama kehidupan masyarakat.

Ade Fadillah, (2017) "Fenomena Pengemis Di Kota Langsa (Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis". Adapun tujuan dari penelitian ini yakni melihat faktor-faktor yang menimbulkan kegiatan mengemis yang dilihat dari aspek struktur dan budayanya, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dengan jelas mengapa masyarakat melakukan kegiatan mengemis untuk pekerjaan mereka sehari-hari.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *grounded research*, dengan ini diharapkan data yang didapatkan bersifat deskriptif dan analisis yang mengarah pada generalis. Teknik ini juga berusaha untuk mengetahui secara dalam arti masyarakat atau seseorang berdasarkan subjek penelitian, sehingga diharapkan mampu memperoleh data dan informasi yang jelas.

Hendy Setiawan, (2020) "Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban Dan Rural Di Daerah Istimewa Yogyakarta".Adapun tujuan penelitian ini melihat tingkat gelandangan pengemis di daerah Yogyakarta yang diakibatkan oleh meningkatnya perkembangan

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

kawasan Urban dan Rural di daerah tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan fenomena gelandangan pengemis bermigrasi ke daerah Yogyakarta untuk memperoleh keuntungan suatu individu atau masyarakat.

Metode yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan cara pengidentifikasian terhadap fenomena yang terjadi, dalam pengidentifikasian ini diharapkan mampu memperoleh data yang jelas dan akurat.

Tiyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi, (2016) "Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis".Adapun tujuan dari penelitian ini, melihat fenomena pengemis dan gelandangan yang semakin meningkat serta dapat menjelaskan persoalan yang tengah terjadi di daerah tersebut.

Metode yang dipakai peneliti dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dimana diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan tersebut, sehingga diharapkan mampu mendapatkan informasi dan data yang aktual.

Wilda Muhfira, (2020) " Potret Ekonomi Petugas Parkir Wanita Lansia Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat". Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu berusaha untuk dapat melihat apa saja dorongan wanita menjadi petugas pakir dan melihat bagaimana potret sosial ekonomi petugas parker wanita lansia khusunya di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

Dari penelitian terdahulu diatas, tentunya tetap menghadirkan perbedaan dan persamaan pada setiap penelitian.Perbedaan penelitian disini ialah terletak pada lokus dan fokus penelitian yang akandilakukan oleh peneliti, sedangkan

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

persamaanya terdapat pada metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif.Jika sebelumnya telah dilakukan penelitian yang berfokus terhadap pengidentifikasian kehidupan sosial ekonomi pengemis dan bentuk kehidupan pengemis, maka dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada analisis dampak pengemis terhadap kehidupan sosial masyarakat danbentuk penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Meulaboh Kebupaten Aceh Barat.

2.2 Fenomenologi Pengemis

2.2.1 Pengertian Pengemis

Pengemis berasal dari dua kata yaitu "emis" yang berarti mengharapkan pemberian orang lain serta meminta belaskasihan orang lain, kata selanjutnya "pengemis" adalah individu yang melakukan kegiatan atau pekerjaan mengemis. Pengemis adalah individu yang memperoleh pendapatan dengan beraneka ragam cara untuk, mendapatkan dan mengharapakan simpati dari masyarakat, sehingga masyarakat memberikan sejumlah uang dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Saddam 2016:18).

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Pada dasarnya pengemis merupakan bagian dari gelandangan yang bertahan hidup dengan mengandalkan dan mengharapkan empati masyarakat sehingga, pengemis mampu memperoleh pendapatan yang di gunakan untuk kehidupannya sehari-hari.Pengemis juga merupakan manusia atau individu yang memperoleh pendapatan dengan mengharapkan simpati masyarakat, serta dapat di jumpai di daerah perkotaan yang tingkat masyarakatnya lebih banyak.Pengemis juga di kelompokan individu yang tergolong miskin karena, untuk memenuhi kebutuhannya, pengemis mengharapkan dari pemberian orang lain, pengemis tidak

mempunyai pekerjaan yang tetap karena disebabkan ketidakmampuan manusia dalam bekerja sehingga memaksa mereka untuk menjadi pengemis yang bertujuan untuk bertahan hidup (Sahriana 2016:97).

Pengemis ialah sebagian masyarakat yang terpisahkan dari pembangunan, pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya.Para pengemis juga tergolong pada wilayah atau tempat yang kurang baik atau kurang layak untuk ditempati oleh manusia pada umunya.Banyak masyarakat juga beranggapan bahwa pengemis merupakan suatu individu yang mengganggu keteraturan jalan umum minsalnya jorok, tidak memilki aturan, pembohong, tidak berusaha, acuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Pada dasarnya persepsi masyarakat tentunya berbeda-beda, oleh sebab itu untuk memperoleh kebenaran, suatu permasalahan sosial tentunya, dibutuhkan penjelasan dan pemahaman terjadap permasalah tersebut sehingga, dapat di ketahui kebenaran suatu persoalan yang terjadi di dalam suatu masyarakat.Fenomena pengemis ini berawal dari ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga memaksa sebagian masyarakat tersebut untuk bertahan hidup dengan melakukan pekerjaan menjadi pengemis, fenomena pengemis juga berawal dari ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kemampun masyarakat tersebut,faktor tubuh yang tidak sempurna menyebabkan mereka memilih untuk menjadi pengemis.

Para pengemis juga dihadapkan oleh kebutuhan hidup yang semakin meningkat oleh sebab itu, mereka harus mampu bertahan hidup.Sebagian

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

masyarakat juga memanfaatkan hal tersebut demi kepentingan pribadi untuk memperoleh kekayaan atau dikenal juga dengan pengemis palsu.Adapun modus-modus yang dilakukan oleh pengemis yaitu menggunakan atau mengenakan pakaian yang tidak layak pakai, serta mempunyai kelompok-kelompok pengemis dan lai-lain (Saddam 2016 :19).

Aturan syariat islam tentang larangan mengemis terdapat dalam QS. Huud Ayat 51 yang artinya " Wahai kaum ku, aku tidak meminta upah kepadamu atas (seruanku) ini. Imbalanku hanyalah Allah SWT yang telah menciptkanku. Tidaklah kamu mengerti ?" . Dalam HR. Abdullah Bin Umar Radhiyallahu anhu, Ia berkata Rasurullah SAW bersabda " Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong dagingpun diwajahnya.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa "tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pada pasal ini bermakna bahwa, setiap manusia memiliki hak untuk mendapatakan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga, hal ini juga di dukung oleh kemampuan manusia dalam melakukan pekerjaan, pendidikan, serta faktor-faktor pendukung dalam melakukan suatu pekerjaan.Seterusnya di jelaskan pula pada pasal 34 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara".Pada pasal ini, bermakna bahwa setiap masyarakat fakir miskin dan anak-anak terlantar harus di rehabilitasi dan di pelihara oleh negara untuk kenyamanan kehidupan sosial masyarakat.Pengemis juga diartikan suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung dan dilakukan di posisi atau tempat-tempat yang strategis.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Pada pasal 504 KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang "perbuatan mengemis di muka umum" dengan jelas di paparkan bahwa "barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu". Pekerjaan pengemisan pada umumnya tidak adanya keterampilan atau syarat dalam melakukan pekerjaan pengemis cukup mendapatkan simpati atau empati dari masyarakat yang lainnya sehingga, mampu memperoleh pendapatan yang gunakan pengemis dalam mencukupi dan memenuhi kebuthan hidup. (Adrianus 2016:04)

2.2.2 Aturan-aturan Pemerintah Tentang Pengemis

Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penanggulangan GePeng (Gelandangan Pengemis). Dalam hal ini pemerintah Dinas Sosial melakukan beberapa upaya terhadap penanganan Gelandangan dan Pengemis yang ditetapkan pada pasal 7 yakni;

1. Upaya Preventif yaitu :

   a. Adanya upaya pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketenagakerjaan

   b. Adanya upaya peningkatan derajat kesejahtraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas dibidang kesehatan

   c. Adanya upaya memberikan fasilitas tempat tinggal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, bidang sosial dan/atau pemukiman, sarana dan prasarana wilayah

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

a. Adanya upaya peningkatan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas dibidang pendidikan

b. Adanya upaya penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho di tempat umum, bimbingan sosial, bantuan sosial, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang dilaksanakan oleh SKPK (Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian) yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang sosial

2. Upaya Koersif

a. Adanya tindakan penertiban yang dilakukan kepada setiap orang yang menggelandang di tempat umum, mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum, meminta-minta di tempat umum, misalnya di Pemukimana, dan Peribadatan, selanjutnya meminta – minta dengan menggunakan alat.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

b. Adanya tindakan penertiban sebagaimana yang dimasud pada ayat (2) yang dilakukan oleh SKPK (Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian) dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

c. Adanya upaya penjangkauan yang dilakukan secara terpadu oleh SKPK (Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian) yang memiliki tugas dan fungsi dibidang sosial dan lembaga kesejahtraan sosial

d. Gelandangan dan pengemis ketika dirazia harus dilakukan tes HIV/AIDS

3. Upaya Rehabilitatif

a. Adanya pemberiaan motivasi dan diagnose BPSS (Biologi, Psiko, Sosial dan Spiritual)

b. Adanya perawatan dan pengasuhan

c. Adanya pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

d. Adanya bimbingan mental spiritual

e. Adanya bimbingan fisik

f. Adanya bimbingan sosial dan konseling psikososial

g. Adanya pelayanan aksesibilitas

h. Adanya bantuan dan asistensi sosial

i. Adanya bimbingan resosialisasi

j. Adanya bimbingan lanjut

k. Adanya rujukan

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

l. Adanya pelatihan keterampilan dan magang

4. Upaya Reintegrasi Sosial

a. Adanya bimbingan resolasi

b. Adanya koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota

c. Adanya pemulangan

d. Adanya pembinaan lanjutan

e. Adanya pelimpahan

5. Upaya Promotif

a. Adanya upaya pemberian informasi melalui baliho di tempat umum

b. Adanya sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik

Pemerintah memiliki peran penting dalam suatu negara, dimana pemerintah membuat aturan atau kebijakan yang memberikan perlindungan, pemeliharaan, kedamaian, keteraturan serta menjaga hak dan kewajiban warga negaranya. Setiap warga negara harus patuh dan tunduk terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah demi keamanan dan kenyamanan suatu wilayah atau daerah. Fenomena pengemis sering juga terjadi di lingkungan masyarakat, pada dasarnya telah di buat beberapa aturan pemerintah yang bertujuan memberikan aturan terkait larangan untuk tidak mengemis namun, banyak masyarakat di beberapa daerah khususnya daerah perkotaan masih saja melakukan kegiatan mengemis. (Mufti 2021:30)

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur pada Bab 1 pasal 504 ayat (1) "Barang siapa meminta-minta (mengemis) di tempat umum dihukum karena meminta-minta, kurungan selama enam minggu", ayat (2) "meminta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan". terkait larangan mengemis ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan pengemisan di muka umum.

Larangan melakukan kegiatan mengemis juga di tegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 505 ayat (1) "Barang siapa dengan tidak mempunyai pencaharian mengembara kemana-mana dengan kurungan selama-lamanya tiga bulan", ayat (2) "Pelancong yang dilakukan bersama-sama

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

oleh tiga orang atau lebih yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun dihukum kurungan selama-lamanya enam bulan".

Fenomena larangan untuk mengemis juga di tegaskan pada peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis mendeskripsikan pada pasal 1 ayat (2) Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum", ayat (3) "Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidup berpindah-pindah di tempat umum". Ayat (4) Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang memiliki gangguan jiwa. Ayat (5) "Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. (Mufti 2021:31)

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis terdapat pada pasal 4 "Tindakan preventif dilaksanakan untuk mencegah atau mnegurangi timbulnya masalah gelandangan, pengemis, Gepeng di lingkungan masyarakat". Pasal 5 "Kegiatan tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan dengan cara antara lain, penyuluhan, bimbingan sosial, dan pembinaan". (Adrianus dkk 2016:6).

Larangan keberadaan pengemis sudah di jelaskan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2016 pada Bab VIII pasal 22 yakni :

Setiap orang dilarang :

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

1. Melakukan aktivitas menggelandang dan mengemis baik perorangan maupun berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belaskasihan orang lain.
2. Memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud melakukan penggelandangan dan/atau pengemisan.
3. Mengajak, membujuk, membantu, menyeluruh, memaksa, dan megkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadi penggelandangan dan/atau pengemisan.

2.3 Kehidupan Sosial

2.3.1 Definisi Kehidupan Sosial

Kehidupan Sosial adalah gambaran kongkrit yang ada di dalam seluruh lapisan masyarakat,membahas tentang masyarakat tentunya akan memperoleh dan mendapatkan suatu permasalahan baik itu,permasalahan sosial masyarakat, maupun sosial lingkungan. Perkembangan serta pertumbuhan zaman menyebabkan masyarakat tidak dapat lari dari namanyan permasalahan yang ditimbulakan, sehingga kehidupan sosial merupakan gambaran konkrit terhadap suatu kebijakan.Kehidupan sosial tidak dapat lepas dari yang namanya masyarakat, sehingga terdapat berbagai gambaran kongkrit tentang masyarakat yaitu, biologis dimana dipahami terkait dengan usia dan gender, sosial dipahami sebagai level pengetahuan dan pernikahan, ekonomi di pahami sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan seperti mata pencaharian, bentuk mata pencaharian serta penghasilan, wilayah berdasarkan domisili masyarakat. (Nurtanio 2007:1-3)

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Kehidupan sosial juga dapat dipahami adalah sebagai, suatu peralihan masa yang mengakibatkan adanya suatu ketentuan atau paksaan terhadap seluruh lapisan masyarakat untuk mengikuti hal tersebut.Masyarakat mau tidak mau harus melakukan hal tesebut karena, disebabkan oleh peralihan masa yang lebih modren sehingga, kehidupan sosial masyarakat pun semakin berkembang kearah yang lebih modren.Kehidupan sosial masyarakat akan semakin berkembangan dan semakin mudah akibat adanya pertumbuhan atau perkembangan masa kehidupan, masyarakat pun semakin meningkat baik itu sektor perekonomiannya, teknologinya, maupun masyarakatnya, yang semakin berkembangan dan memperbarui diri.

Kehidupan sosial menjadi suatu bentuk atau pola di dalam masyarakat, yang memilki fungsi dan hubungan dengan seluruh anggota masyarakat, yang berbaur dan saling berintraksi untuk menjalani kehidupan yang baik dalam masyarakat, sehingga kehidupan sosial yang baik yaitu kehidupan yang saling menghargai berbagai perbedaan dalam masyarakat baik ras, etnis maupun agama untuk menjalin kehidupan sosial yang utuh.Kehidupan sosial juga di artikan suatu hasil praktik kehidupan yang terjadi di masyarakat yang harus diperhatiakan dan dipahami, untuk menjalin intraksi atau hubungan yang baik dalam menjalani kehidupan bersosial, agar tidak terjadi berbagai persoalan-persoalan sosial yang dapat merusak kehidupan sosial masyarakat . (Aprilia 2020:17)

Masyarakat adalah kumpulan individu yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam suatu wilayah tertentu, serta memiliki kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengikat satu sama lainnya. Masyarakat juga sering di artikan sebagai anggota individu-individu yang mendiami suatu daerah atau

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

wilayah yang cukup lama serta memiliki adat istiadat yang berbeda-beda.Sehingga dalam kehidupan sosialnya saling berintraksi dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya demi terwujudnya kehidupan yang saling menguntungkan dan saling berintraksi satu dengan yang lainnya.

2.3.2 Bentuk-bentuk Kehidupan Sosial

Bentuk-bentuk kehidupan sosial adalah suatu bentuk atau pola kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tentunya masyarakat akan saling berpengaruh, saling bersaing, saling ketergantungan, serta saling bekerjasama untuk membentuk suatu hubungan yang berkesinambungan dan memiliki tujuan yang sama. Adapun bentuk-bentuk kehidupan sosial masyarakat yakni:

1. Kehidupan sosial budaya masyarakat

   Merupakan suatu kehidupan sosial yang dapat diamati dari budaya suatu masyarakat, sehingga budaya juga dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun-temurun yang dianggap benar dan dipercaya oleh masyarakat setempat. (Riski, 2009:13)

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

2. Kehidupan sosial ekonomi

   Merupakan suatu kehidupan yang berhubungan dengan pemenuhan prekonomian masyarakat sehingga masyarakat berusaha untuk memenuhi kehidupan prekonomiannya sehingga, adanya kerjasama dengan sekelompok masyarakat untuk memenuhi kehidupan prekonomian masyarakat tersebut. (Andi, 2015:6)

3. Dinamika kehidupan sosial masyarakat

> Merupakan suatu perubahan yang terjadi didalam masyarakat yang ditimbulkan oleh perubahan baik secara lambat maupun cepat, perubahan yang terjadi disebakan oleh proses reformasi dari bentuk-bentuk kehidupan masyarakat. (Yohanes, 2012:10)

Bentuk-bentuk kehidupan sosial masyarakat dapat saling mempengaruhi dan saling berkaitan sehingga, masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan keadaaan yang terjadi di lingkungan masyarakat.Segala permasalahan, bentuk kerjasama, serta bentuk hubungan masyarakat tentunya saling berkaitan demi terciptkannya suatu struktur dalam kehidupan sosial masyarakat.

2.4 Teori Fenomenologi

Teori fenomenologi merupakan suatu aksi filsafat yang di pelopori oleh Edmund Husserl, yang menjelaskan fenomenologi merupakan pengalaman individu atau masyarakat terhadap suatu fenomena atau penampakan yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan kata lain dikenal dengan “arus kesadaran”.Teori fenomenologi ini berusahan melihat, mengawasi, dan mengkaji aktivitas jiwa seseorang atau masyarakat.Aliran fenomenologi lahir sebagi suatu reaksi metodelogi positivistik yang pertama kali diperkenalkan oleh Comte, pada pendekatan positivisme dimana pada pendekatan ini lebih memanfaatkan segala fakta sosial yang bersifat objektif atau berdasarkan peristiwa sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dapat dilihat secara langsung dan nyata. (Wiirawan, 2012:133)

Husserl juga menjelaskan ada empat*keyword* yang menjadi pemahaman terhadap fenomenologi yakni, fenomenologi merupakan suatu kenyataan esensi atau dalam fenomena terdapat nomena, kemudian selanjutnya adanya observasi

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

dimana diartika sebagai tindakan yang berhubungan dengan jiwa seseorang, selanjutnya adanya kesadaran adalah hal yang bersifat *transparan* serta memiliki arah terhadap suatu tujuan, kemudian substansi merupakan kenyataan suatu bentuk dari unsur kenyataan tersebut sehingga bisa di peroleh. Observasi yang dilakukan Husserl dalam bentuk hubungan kesadaran yakni, objektifikasi, identifikasi, korelasi, dan konstitusi. (Wirawan 2012:138).

Fenomenologi ini hadir untuk melihatreaksi metodologi positivistik yang diperkenalkan oleh Comte, dimana pendekatan ini sering digunakan untuk melihat seperangkat fakta sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dan bersifat objektif atau suatu kejadian yang berdasarkan atas gangguan yang terlihat oleh manusia secara langsung dan jelas, sehingga ketika telah memperoleh atau melihat gangguan atau gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat tentunya akan melihat arti dari gejala tersebut. Husserl juga menjelaskan dalam metodologi positivistik ini menekankan pada "*meaningfulnes"* artinya bukan melihat, memahami sesuatu kejadian atau masalah sosial berdasarkan permukaannya saja melainkan mampu melihat, memahami sisi-sisi lain dari masalah tersebut serta memahami penyebab dari masalah tersebut. (Wirawan 2012:137)

Metode Husserl ialah, merefleksikan segala pengalaman sosial-kesadaran terhadap diri sendiri dengan saling berhubungan satu dengan yang lainnya atau juga dikenal sebagia intense dengan kehidupan sosialnya. Dalam Epistimologi Hussrel juga membahas tentang permasalahannya sendiri, dalam cara berfikir Husserl dimana membebaskan diri dari pengaruh tradisi ilmiah. Dalam penjelasan Husserl fenomenologi masuk kedalam aspek idealis, kehidupan sosial, pengalaman masyarakat atau individu.Dalam cetusan Husserl ada beberapa kata kunci dalam

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

pengamatannya yakni, fenomena adalah realitas esensi atau dalam fenomena yang terjadi terdapat nomena, pengamatan yang berdasarkan aktivitas spiritual atau bersifat rohania, kesadaran merupakan sebuah intensional secara terbuka dan terarah terhadap suatu objek, kemudian subtansi merupakan bentuk nyata yang mendeskrisikan isi dan struktur *realita* dan dapat dijangkau. Pengamatan dari Husserl juga terkait dengan struktur intensionalitas kesadaran, yang merumuskan terdapat empat aktivitas yang interen yakni, objektifitas, identifikasi, korelasi, dan konstitusi.

a. *Intensionalobjektifikasi* fungsi dari intensionalitas yakni mampu menghubungkan suatu data yang diperoleh dari aliran kesadaran.
b. *Intensionalitas sebagai identifikasi* yakni sebuah intensi dimana pada struktur ini mengarahkan segala data dan gejala. Pada struktur ini dipengaruhi beberapa aspek minsalnya, motivasi, minat, keterlibatan emosional, serta intelektual.
c. *Intensionalitas Korelasi* yakni, menghubungkan segala aspek yang diambil dari objek yang sama serta menunjukan aspek-aspek lain menjadi horisonnya.
d. *Intensionalitas konstitusi* yakni melihat segala ativitas intensional dimana berfungsi untuk mengkonstitusikan suatu objek.

Menurut Orleans, fenomenologi merupakan alat untuk memahami suatu hubungan secara lebih mendalam terhadap kesadaran individu dan kehidupan sosialnya. Fenomenologi mampu berupaya menjelaskan dan mengungkapkan suatu aksi sosial, situasi sosial, dan masyarakat sebagai suatu subjek atau produk kesadaran manusia.Selanjutnya bagi Berger, terkait analisis fenomenologi

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

mepunyai beberapa metode yakni, metode deskriptif dimana pada metode ini bersifat empiris, serta beroprasi dengan asumsi kualitas yang menyeluruh, selanjutnya mendeskripsikan secara terstruktur terhadap kehidupan sosial masyarakat. (Wirawan, 2012:138)

Fenomenologi lebih menekankan pada keunikan spirit manusia yang memerlukan beberapa metode khusus sehingga mampu dalam mengetahui lebih mendalam, dalam fenomenologi juga melihat serta memahami maksud dari tindakan suatu masyarakat, kelompok maupun individu sehingga mampu memperoleh secara mendalam terkait data yang telah diperoleh baik secara langsung maupun berdasarkan data atau fakta yang telah di peroleh dari kehidupan masyatakat. Tindakan masyatakat tentunya dipengaruhi oleh maksud dan tujuan dari masyarakat itu sendiri, tindakan individu merupakan sebuah tindakan yang merujuk pada suatu motif tujuan yang sebelumnya dialami dan dilihat secara langsung, tindakan yang dilakukanpun berdasarkan rasionalitas. Menurut Collin, fenomenologi mampu mengungkap suatu objek baik secara meyakinkan, ataupun objek yang berupa kognitif maupun tindakan atau pembicaran seseorang. (Wirawan, 2012:144)

Teori fenomenologi terdapat tahap-tahap metode yaitu:

1. Reduksi Fenomenologi adalah langkah awal untuk pemurnian fenomena yang dilaksanakan pertama kali oleh seorang peneliti. Pada langkah ini merupakan awal dari pemahaman suatu fenomena dimana adanya pengobservasian atau pengamatan terhadap objek yang ingin kita ketahui apa yang menyebabkan timbulnya fenomena tersebut. Reduksi fenomena ini juga berusaha melihat “hal apa yang terjadi di balik fenomena yang

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

terlihat di lingkungan masyarakat tersebut", sehingga peneliti berusaha mengetahui kejelasakan suatu fenomena. Adapun tugas dari fenomenologi yakni mampu menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, serta kegiatan pengalaman dan pengetahuan yang berakar. (Wirawan 2012:142)

2. Reduksi Eidetis adalah suatu langkah reduksi kedua, tahapan ini berspektif fenomenologi. Pada tahapan ini berusahan untuk menghasilkan isi dari fakta yang telah diperoleh, sehingga memperoleh hasil yang diinginkan oleh peneliti, dalam memperoleh hasil yang diinginkan tentunya peneliti harus mampu menjelaskan gambaran terkait masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, selanjutnyaadanya tahap pengidentifikasian dan pengelompokan informasi dan data yang di peroleh dilokasi.

   Pengumpulan informasi dan data di hentikan apabila data yang diperoleh sudah jenuh.Situasi ini juga ditandai dengan data dan fakta yang telah diperoleh dan dikumpulkan serta menunjukan hal yang sama dari berbagai kondisi dan situasi yang berbeda. (Wirawan 2012:143)

3. Reduksi Transendental adalah mampu memperoleh fakta yang bersifat empiris menjadi fakta yang murni. Pada langkah ini berusaha untuktinggalmelihat kesadaran tindakan individu sendiri yakni kesadaran murni. Dalam fase ini, diri sendiri dan kebenaran adalah yang dicapai dalam kesesuaian antara yang dilihat secara langsung, dipikirkan dan serta dialami dengan makna yang diperoleh. Reduksi Transendental bertujuan untuk dapat memperoleh suatu subjek secara murni, dalam memperoleh kemurnian serta kejernian data yang di dapatkan. Pada proses ini

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

dikelompokan dengan menggunakan segala sumber dan teknik disebut dengan dat *triangulation*atau *investigator ntriangulation.* (Wirawan 2012:144)

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah aturan ilmiah untuk memperoleh fakta dengan target atau sasaran dan kepentingan tertentu. Dalam hal tersebut, ada empat kata pokok atau kata penting yang harus di perhatikan yaitu, aturan ilmiah, fakta, target, dan kepentingan tertentu.Adapun metode penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ialah metode penelitian kualitatif.

Motode penelitian kualitatif juga suatu metode penelitian yang dipakai oleh peneliti untuk dapat melihat dan mengidentifikasi suatu objek, tujuan, secara alami, dan seorang peneliti ialah sebagai alat yang terpenting dalam suatu penelitian. Cara pengumpulan data atau informasi yang digunakan yaitu pengumpulan data, pemecahan permasalahan, pengidentifikasian, serta pandangan ahir pada penelitian kualitatif yang lebih mengutamakan pada *realita* serta data yang telah diperoleh dari pada suatu proses penyimpulan umum terhadap suatu kejadian.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Penelitian kualitatif bertujuan untuk berusaha merubah pola atau bentuk kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yakni bersifat deskriptif yang bertujun untuk menggambarkan hasil penelitian peneliti secara terstruktur, aktual dan akurat terkait gejala-gejala, serta kejadian-kejadian atau persoalan-persoalan yang ingin diselidiki.

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, sumber primer ialah data yang diperoleh langsung diberikan kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh tidak langsung memberikan data untuk pengumpulan data, seperti dari orang lain dan dari dokumen, yaitu jenis data penelitian yang didapat dari teknik dokumentasi yang memanfaatkan sumber yang berhubungan dan mendukung objek yang diteliti (Sugiyono, 2008).

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat dari sumber kedua atau sumber sekunder terhadap data yang di butuhkan misalnya memulai suatu dokumentaasi. Data ini juga dipahami sebagai sumber data yang diambil dari dokumen, yang dapat membantu dalam memperoleh suatu data penelitian (Bugin, 2008).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Termuat dalam teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti dari buku Sugiyono yakni :

1. Wawancara

   Esterberg (2002) dalam bukunya Sugiyono (2017:231) yang menjelaskan wawancara adalah perubahan data yang diperoleh dari kedua belah pihak yang berasal dari hasil pertanyaan yang di berikan kepada masyarakat yang bersangkutan sehingga, mempu menghasilkan suatu data atau informasi yang jelas dan akurat.

2. Dokumentasi

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Dokumentasi merupakan sebuah pengetahuan tentang informasi didapat dari ulasan-ulasan yang berkaitan dengan masalah yang ingin di teliti oleh seorang peneliti dari sebuah permasalahan yang terjadi.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Purposive Sampling*, metode *Purposive Sampling* ini adalah cara yang digunakan untuk penelitian yang lebih mengarah ke proses penentuan informan dengan memperhatikan tujuan penelitian. (Sugiyono, 2017:21).

Adapun narasumber yang dipilih menjadi informan adalah sebagai berikut

Tabel 3.4 Profil Informan

No	Nama	Keterangan
1	Ns. Wardiyan Syaputra S. Kep	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lansia
2	Edwin Radinal, S. Sos	Bidang Rehabilitasi Sosial
3	M.Yuthi, SE	Kabid Kentraman Dan Ketertiban Umum
4	Lela	Penjual Kelontong Di Daerah Pajak Meulaboh
5	Amelia	Penjual Kelontong Derah Pasar Ikan Meulaboh
6	Ahmad	Penjual Ikan Di Derah Pasar Ikan Meulaboh
7	M. Kahadir, SE	Kaur Tata Usaha Dan Umum Gampong Pasi Pinang, Meureubou
8	Ali	Pengemis
	Jumlah	8 Orang

Sumber: disusun oleh penulis

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Adapun alasan peneliti, memilih informan tersebut dalam penelitian ini ialahuntuk memperoleh informasi serta, untuk membantu proses pengumpulan data yang jelas, sehingga diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang ingin diperoleh peneliti dalam penyusunan penelitian. Kemudian ditentukan juga berdasarkan kepentingan data dan profesi informan untuk mejawab pertanyaan peneliti dalam penyusunan penelitian, yang bersumber dari data dan informasi yang *real*, jelas dan akurat.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan seorang peneliti, sehingga peneliti merupakan alat untuk melakukan validasi data agar mampu melihat mampu tidaknya peneliti dalam melakukan penelitian langsung di lapangan. Peneliti tentunya harus memilih informan yang mengetahui dengan mendalam terkait jawaban yang ingin kita peroleh sehingga mampu menafsirkan data, analisis data, serta mempu memberikan kesimpulan yang jelas terkait penelitiannya. (Sugiyono, 2017 : 222)

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (1948) yang mana dalam bukunya Sugiyono (2017:246) menjelaskan ada 3 tahap yang dilakukan dalam kegiatan analisis data yakni

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

   Reduksi data merupakan suatu sistem pengambilan data yang dihasilkan dari data dari lokasi penelitian, sehingga peneliti mampu merangkum

segala data-data yang dihasilkan dan dianggap penting sehingga menghasilkan data yang jelas dan akurat.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

   Penyajian data merupakan tahapan selanjutnya yang nantinya akan digunakan oleh peneliti setelah reduksi data yang memberikan data yang lebih nyata atau jelas dalam suatu bentuk penguraian sederhana maupun bagan yang disajikan dari grafik, table,*pictogram, phi chard* dan lain-lain.

3. Verifikasi

   Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Tahapan ini bersifat sementara dan belum dapat menimbulkan kepercayaan dan dapat berubah saat tidakdiperolehnya bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran atau kevalidan suatu data.

3.7 Pengujian Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau biasa disebut kepercayaan data hasil penelitian kualitatif yakni menggunkan perpanjangan observasi, peningkatan ketekunan, dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan orang lain, sehingga memperoleh data yang lebih *detail* terhadap subjek penelitian (Sugiyono, 2017:270).

a. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data, teknik ini juga melihat sumber, membandingkan dan melakukan pengecekan kembali kepercayaan terkait suatu informasi yang diperoleh melalui waktu yang berlainan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini digunakan

untuk melakukan pemerikasaan kembali melalui sumber data yang diperoleh (Sugiyono, 2008).

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitianini diberikan jadwal waktu dalam melakukan penelituan ini terhadap pandangan masyarakatdilakukan dalam waktu kurang lebih 6 bulan di Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan table dibawah ini;

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Tabel 3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan/Tahun 2021			
		9	10	11	12
I	Persiapan Penelitian				
	Observasi Awal				
	Pembuatan Proposal				
	Konsultasi				
	Seminar Proposal				
	Perbaikan				
II	Penelitian Lapangan				
	Pengolahan Data				
	Analisis Data				
III	Penulisan Hasil				
	Konsultasi				
	Seminar Hasil				
	Perbaikan				
IV	Sidang				

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran UmumLokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini, peneliti tentunya mengetahui kondisi lingkungan masyarakat di daerah yang nantinya penulis teliti sehingga mampu memperoleh data dan fakta yang akurat. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti ialah Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, tentunya dalam penelitian ini perlu juga mengetahui letak geografis serta lembaga yang berpengaruh dalam penelitian ini.

4.1.1 Letak Geografis Kota Meulaboh

Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat terletak pada 04^0 06'- 04^0 07' Lintang Utara dan 95^0 40' Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Aceh Barat yakni;

Utara : Kabupaten Pidie Jaya dan kabupaten Aceh Jaya

Selatan : Kabupaten Nagan Raya dan Samudra Hindia

Timur : Kabupaten Aceh Tengah Dan Kabupaten Nagan Raya

Barat : Samudera Hindia

Meulaboh merupakan Kota yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat yang memiliki luas kurang lebih 2.927,95km^2, lautan sejauh 12 mil seluas 957,38 km^2 serta dengan garis pantai 54,84 km. Secara Administratif Kabupaten Aceh Barat terbagi dalam 12 kecamatan 36 kemukinan, dan 322 gampong, 192 gampong diantaranya berada didaratan dan 83 gampong yang terletak di lembah, 42 gampong terletak dilereng. Penduduk Meulaboh mayoritas islam serta dengan mata pencaharian pada sektor perikanan, perkebunan, pertanian dan perternakan.

Kota Meulaboh adalah Ibu Kota dari Kabupaten Aceh Barat yang terdapat di Kecamatan Johan Pahlawan, luas wilayah Johan Pahlawan 44,91, persentase dari luar Daerah 153,00 dan jumlah Gampong 21. Kecamatan yang terdekat dengan Kota Meulaboh yakni Kecamatan Meureubo, Kecamatan Samatiga dan Kecamatan Kaway XVI, selanjutnya Kecamatan yang paling terjauh Dari Pusat Kota Meulaboh ialah Woyla Timur, Panton Reu dan Sungai Mas.

4.1.2 Profil Dinas Sosial

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 48 Tahun 2016 yang menyatakan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, dimana dalam menimbang dan mengingat serta mewujudkan perangkat Daerah yang berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, bahwa dengan adanya kedudukan dalam Dinas Sosial adalah tindakan lanjut dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah Aceh Barat yang tercantumkan pada Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat. Adapun susunan organisasi Dinas Sosial pada pasal 8 yakni :

1. Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda, Kepala Dinas juga bertugas untuk mengayomi dan memimpin Dinas Sosial serta segala anggota untuk terwujudnya pelayanan kesehatan dan kesejahtraan sosial bagi masyarakat.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

2. Sekretaris, bertugas untuk melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan. Sekretaris terdiri dari;
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian, memiliki tugas melaksanankan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
   b. Subbagian Program dan Keuangan, bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan adiministrasi keuangan.
3. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bantuan sosial dan pengendalian penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. Bidang ini terdiri dari;
   a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, bertugas melakukan kesiapsiagaan dan mitigasi, pengelolaan logistik, penanganan, pemulihan, penguatan korban bencana alam.
   b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, bertugas untuk melaksanakan pencegahan, penanganan, pemulihan, dan reintegrrasi korban bencana sosial.
   c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga, bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan penyaluran bantuan serta pendampingan jaminan sosial keluarga.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, bidang ini bertugas untuk melakukan pelayanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) dan pembinaan panti sosial. Bidang ini terdiri dari;

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia, bertugas untuk melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak dan lanjut usia di dalam panti sosial dan luar panti sosial.
b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, betugas untuk melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dalam panti sosial dan luar panti sosial.
c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan orang

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, bidang ini bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksankan pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga, KAT, lembaga sosial, masyarakat, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta penanganan fakir miskin. Bidang ini terdiri dari;
   a. Seksi Indentifikasi Dan Penguatan Kapasitas, mempunyai tugas untuk melaksanakan pendapatan, identifikasi dan validasi fakir miskin serta penguatan kapasitas pendampingan pemberdayaan masyarakat
   b. Seksi Peberdayaan Sosial Masyarakat, mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan pekerja sosial, tenaga kesejahtraan sosial dan pendataan lingkungan sosial.
   c. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan Dan Restorasi Sosial, bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksankan pelestarian kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pembinaan kelembagaan sosial.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga kerja dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok yang sesuai dengan keahliannya masing-masing.

7. UPTD

Pasal 9 Tahun 2016 membahas tentang tugas dan fungsi Dinas Sosial, adapun tugas dan fungsi Dinas Sosial yakni mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintath dibidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas yang dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penertiban serta pengkajian pada bidang kesejahrtaan sosial yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten;
2. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang kesejahtraan sosial;
3. Penyelenggaraan penyuluhan, bimbingan serta pelatihan kepada masyarakat dalam bidang kesejahtraan sosial masyarakat;
4. Pelaksanaan pemerdayaan dan pendampingan kepada masyarakat terhadap kesejahtraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahtraan sosial;
5. Pelaksanaan pemberian bantuan dan jaminan kesejahtraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahtraan sosial;
6. Pelaksanaan pemberian bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahtraan sosial khususnya akibat bencana alam dan bencana sosial;

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

7. Pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
8. Pelaksanaan pengawasan penetapan pekerja sosial dan fungsional panti sosial;
9. Pengalokasian sumber daya manusia potensial :
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bindang dan tugas serta fungsinya.

Pada pasal 29 menjelaskan tentang tata kerja Dinas Sosial yakni :

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas , Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing
2. Setiap pemimpin satuan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah
3. Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
4. Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
5. Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Adapun Visi Misi Dinas Sosial yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kenyamanan, keamanan, serta kesejahtraan masyarakat, visi misi Dinas Sosial yakni :

Visi : Terwujudnya pelayanan kesejahtraan sosial bagi masyarakat

Misi : a. Meningkatkan Pembinaan masyarakat penyandangan masalah Masalah sosial

b. Mengoptimalkan penanganan masyarakat dampak bencana

c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesejahtraan sosial

Moto Pelayanan “Melayani Dengan Hati”

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial

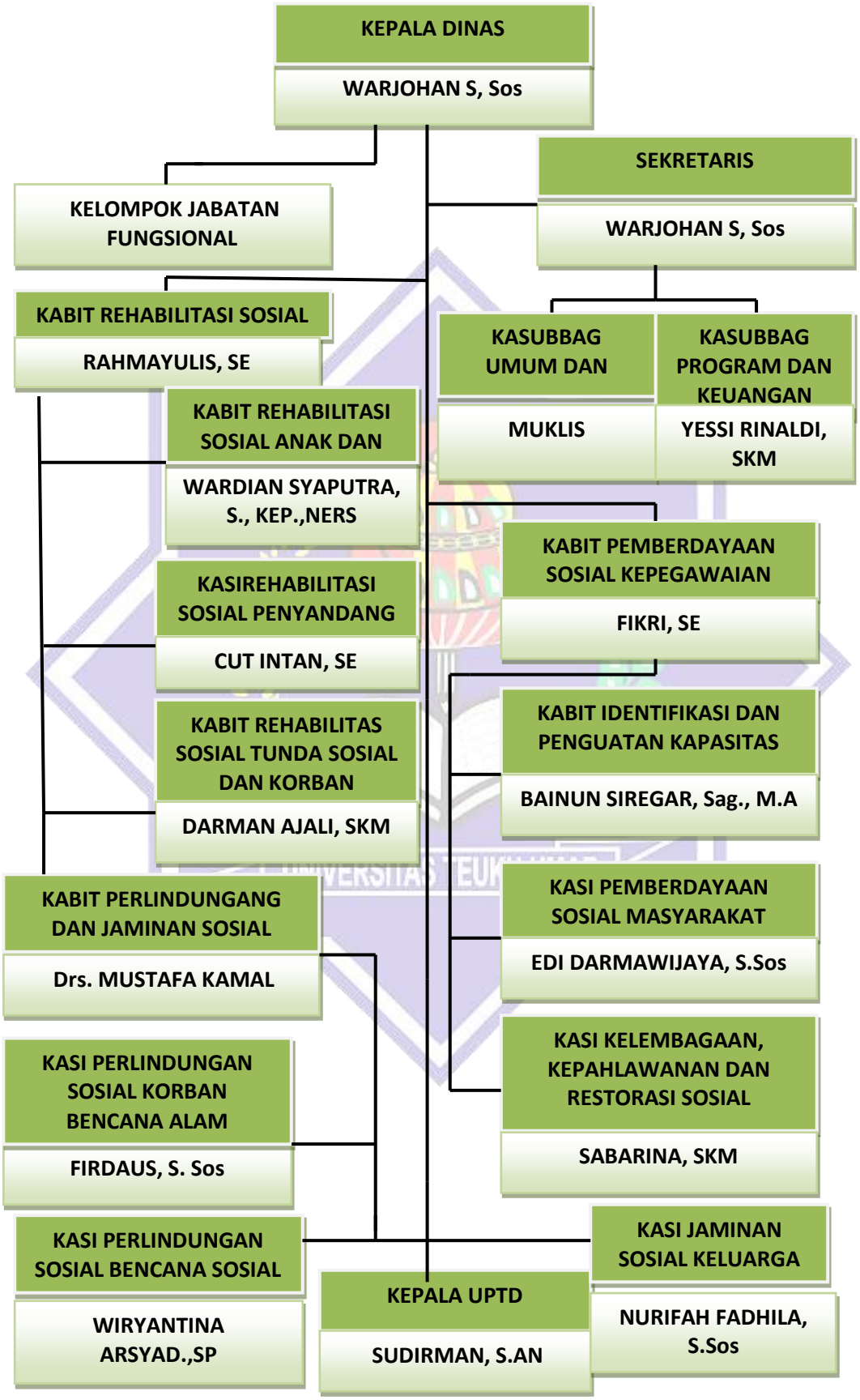

4.2 Pandangan Masyarakat terhadap Perilaku Mengemis Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, ada beberapa pengemis yang dijumpai dibeberapa titik terdapat kegiatan mengemis di Kota Meulaboh sehingga, hal ini mengundang perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi atau penanggulangannya terhadap kegiatan tersebut, yang di lakukan di kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari hasil pernyataan yang diperoleh informan, terkaitpandangan masyarakat terhadap perilaku mengemis di lingkungan masyarakat.

Berikut tanggapan informan mengenai pandangan masyarakat terhadap perilaku mengemis oleh Ibu Amelia selaku pedagang kelontong di Pasar IkanMeulaboh :

> "Keberadaan pengemis tentunya tidak mengganggu, namun kehadiran para pengemis menimbulkan rasa iba karena sebagian pengemis memanfaatkan anaknya untuk memperoleh belaskasihan orang lain sehingga, tentunya keberadaan pengemis suatu hal yang wajar karena memang mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga mereka melakukan kegiatan mengemis. Namun, yang sangat disayangkan ada beberapa oknum pengemis yang membawak anak bayi dan anak-anaknya, yang wajarnya memperoleh pendidikan ikut menjadi pengemis. Kegiatan mengemis sering terjadi di lokasi pasar ikan, sehingga karena sudah terbiasa masayarakat yang lainnya bukan lagi kasian melainkansudah bosan melihat para pengemis di Lokasi tersebut. Dampak buruk dari adanya pengemis yaitu pada dasarnya mengurangi keindahan kota dan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat karena, jika terdapat pengemis maka pemerintah belum mampu memberikan kesejahtraan yang merata, Sejauh ini larangan untuk memberikan sejumlah uang kepada pengemis bagi sebagian masyarakat sudah mengetahui namun, kembali lagi pada masyarakatnya karena atas dasar kepedulian dan kemanusiaan mereka memberikan sejumlah uang kepada para pengemis".
> (Wawancara, 23 November 2021 Pukul 09:30 WIB)

Beberapa masyarakat menganggap pengemis hal yang wajar namun, sangat disayangkan beberapa pengemis berpura-pura untuk mendapatkan belaskasihan masyarakat sebagaimana tanggapan atau jawaban dari informan oleh Kak Lela selaku pedagang kelontong di derah pajak Meulaboh:

> "Keberadaan pengemis menurut tentunya tidak mengganggu, namun pengemis tersebut tidak mampu memperoleh pekerjaan yang sesuai minsalnya kondisi fisiknya tidak memungkinkan lagi untuk bekerja, tentunya hal itu memberikan rasa iba kepada pengemis tersebut. sehingga sebagian masyarakat berusaha memberikan uang walaupun tidak seberapa karena masih mengingat kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Ada beberapa pengemis yang ditemui awalnya ia bisa melihat, berjalan dengan normal namun pada saat mengemis ia berpura-pura buta, serta kondisi kaki dan tangan yang tidak normal, tentunya hal ini sangatlah mengganggu dan sangat disayangkan mengapa melakukan kegiatan tersebut. Keberadaan pengemis yang berpura-pura tersebut tentunya sangat menggangu, karena ia mampu untuk bekerja namun, malah meminta belaskasihan orang lain untuk memperoleh penghasilan, sejauh ini tindakan pemerintah menurut pandangan saya belum tertata dengan baik karena pemerintah belum ada upaya yang mampu mengurangi angka pengemis dan penanganan pengemis pun hanya di pulangkan ke daerah asalnya tentunya hal ini pun menurut saya kurang optimal karna bisa saja mereka akan kembali dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan untuk melakukan kegiatan mengemis".
> (Wawancara, 23 November 2021 Pukul 10:00 WIB)

Kegiatan mengemis merupakan hal yang biasa dilihat oleh masyarakat karena dimana masyarakat beranggapan bahwa pengemis melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana tanggapan dari informan oleh Bapak Ahmad salah seorang penjul Ikan di Pasar IkanMeulaboh :

> "Keberadaan pengemis pada dasarnya tidak mengganggu karena faktor pemenuhan kebutuhan hidup mereka melakukan kegiatan pengemisan tersebut, tentunya para pengemis yang biasanya berada di daerah pasar ikan sudah terbiasa dan sebagaian masyarakat pun memberikan uang untuk memenuhi kebutuhannya, namun sangat disayangkan saja ada pengemis yang bisa dikatakan memiliki kondisi tubuh yang norman namun melakukan kegiatan mengemis, sehingga masyarakat pun malas jika melihat hal demikian. Bukannya masyarakat tersebut berusaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya malah sibuk meminta belaskasihan orang lain,harapan kami semoga para pengemis yang seperti itu dapat diberikan pembinaan oleh pemerintah daerah untuk tidak melakukan kegiatan mengemis. Keberadaan

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

pengemispun mengganggu apabila para penjual ikan sedang sedang bekerja karena dapat menggangu kegiataannya kecuali pada saat tidak ada pelanggan".
(Wawancara, 23 November 2021 Pukul 10:30 WIB)

Kegiatan mengemis menjadi salah satu faktor untuk pemenuhan prekonomian sebagaimana tangggapan informan salah seorang pengemis Bapak Ali Meulaboh :

"Kegiatan pengemis ini saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan ketidakmampuan saya untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan saya, kondisi tubuh juga yang tidak memungkinkan untuk saya memperoleh pekerjaan, kemudian saya menjadi pengemis untuk berusaha mencukupi kebutuhan hidup saya.Pendapatan dari mengemispun hanya cukup untuk makan dan tempat tinggal berhubung juga saya bukan asli orang Meulaboh.Kegiatan mengemis ini saya lakukan karena untuk memenuhi kebutuhan saja, karena tidak mempunyai pekerjaan lain, maka dari itulah saya menjadi pengemis".
(Wawancara, 23 November 2021 Pukul 12:00 WIB)

Perilaku mengemis menjadi suatu hal yang mengganggu apabila ada beberapa pengemis yang mempunyai kondisi fisik yang sehat namun tetap menjadi pengemis sebagaimana tanggapan infroman merupakan salah satu Kaur Tata Usaha dan Umum oleh Bapak M. Khadir, SE di Gampong Pasi Pinang, Meureubo :

"Pandangan masyarakat terkait mengemis pada dasarnya kegitan mengemis tersebut hal yang dilarang. Biasanya para pengemis merupakan salah satu masyarakat yang ditelantarkan oleh keluarganya, kondisi fisik yang tidak lagi memungkinkan untuk bekerja, faktor usia, dan sudah terbiasa mengemis sehingga ia tidak mampu lagi mencari pekerjaan lain. Yang sangat membuat masyarakat marah ada beberapa pengemis yang berusaha menjadi pengemis, jika kita lihat kondisi fisiknya masih mampu untuk memperoleh pekerjaan minsalnya menjadi tukang cuci baju keliling, strika keliling, dan bahkan menjadi ART (Asisten Rumah Tangga), namun sangat disanyangkan beberapa pengemis yang kondisi fisiknya sehat lebih memilih menjadi pengemis karena sudah terbiasa."
(Wawancara, 30 November 2021 Pukul 11:31 WIB)

Tabel 4.2.1 Hasil Wawancara

No	Nama	Hasil Wawancara

	(Keterangan)	Informan
1	Amelia (Penjual Kelontong Di Daerah Pajak Ikan Meulaboh)	Pandangan masyarakat terhadap Keberadaan pengemis tentunya tidak menggangu aktivitas pada saat bekerja, bahkan merasa iba terhadap para pengemis yang berada di Daerah pajak ikan Meulaboh. Namun banyak ditemui para pengemis membawak atau memanfaatkan anak-anaknya untuk menarik belas kasihan masyarakat tentunya, masyarakat merasa kasihan bukan kepada orangtuanya melainkan melihat keadaan anak yang ikut menemani orangtuanya dalam melakukan kegiatana mengemis.
2	Lela (Penjual Kelontong Di Daerah Pajak Meulaboh)	Pandangan masyarakat terhadap perilaku mengemis tentunya kurang mengganggu dikarnakan masyarakat merasa iba karena para pengemis sulit untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau keterampilan pengemis sehingga masyarakat tidak merasa terganggu. Namun beberapa masyarakat merasa tergangu dikarnakan ada beberapa oknum pengemis yang berpura-pura menjadi pengemis untuk memperoleh keuntungan tentunya hal ini sangat disayangkan dan mengganggu kenyamanan kehidupan masyarakat.
3	Ahmad (Penjual Ikan Di Pajak Ikan Meulaboh)	Pandangan masyarakat terhadap perilaku mengemis tentunya kurang mengganggu karena pengemis melakukan kegiatan mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun masyarakat sangat terganggu ada beberapa pengemis yang berusaha berpura-pura menjadi pengemis tentunya, hal ini sangat mengganggu masyarakat dan sangat disayangkan demi memperoleh keuntungan yang mudah masyarakat rela berpura-pura menjadi pengemis
4	Ali (Pengemis Di Daerah Pajak Meulaboh)	Kegiatan pengemisan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, faktor usia, faktor kondisi fisik, dan ketidakmampuan dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keadaan sangatlah sulit. Sehingga dengan melakukan kegiatan mengemis merupakan cara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
5	M.Khadir, SE (Kaur Tata usaha Dan Umum Di Gampong Pasie Pinang Meureubou)	Pandangan masyarakat terhadap kegiatan mengemis tentunya tidak mengganggu karena, untuk memenuhi kebutuhan hidup serta untuk bertahan hidup mereka harus melakukan kegiatan mengemis tentunya, hal tersebut dikarnakan karena para pengemis merupakan salah satu masyarakat yang

		ditelantarkan oleh keluarganya, kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk bekerja, faktor usia, dan ada sebagian pengemis sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan mengemis. Tentunya kegiatan mengemis kurang mengganggu dikarenakan para pengemis melakukan kegiatan tersebut atas dasar ketidakmampuan memperoleh pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sumber dari :Hasil wawancara bersama informan

Berdasarkan dari hasil penelitian peneliti di lapangan maka, keberadaan pengemis bagi sebagian masyarakat kurang mengganggu kehidupan masyarakat karena masyarakat masih mengutamakan kemanusiaan serta kasihan terhadap pengemis-pengemis yang berada di Kota Meulaboh, namun sebagaian masyarakat juga merasa terganggu karena dapat mengurangi keindahan Kota dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, sehingga hal ini diperlukan penanganan dari pemerintah untuk mengatasi adanya pengemis dan para pengemispun diberikan rehabilitasi, untuk dapat memperoleh kemampuan dan penghasilan dari usahanya sendiri dan kerja kerasnya sendiri. Padangan masyarakat terhadap kegiatan mengemis tentunya menjadi hal yang sudah biasa karena diakibatkan sudah terbiasa masyarakat melihat keberadaan pengemis sehingga, sebagaian masyarakat tidak terganggu dengan adanya pengemis.

Keberadaan pengemis menjadi hal yang mengganggu apabila terdapat pengemis yang berusaha untuk meminta belaskasihan oranglain sehingga tentunya hal ini, sangatlah membuat masyarakat yang lain tidak merasa iba melainkan merasa malas, marah melihat tingkahlaku pengemis tersebut.

4.3 Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Pengemis Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

Bersumber dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap upaya pemerintah terkait penanganan pengemis di Kota Meulaboh dalam memberikan pelayanan, pembinaan, pengendalian, perehabilitasi masyarakat demi terciptanya keamanan, ketentraman serta keteraturan sosial masyarakat demi terciptanya kesejahtraan sosial. Dalam hal ini masih dapat kita jumpai masyarakat luar maupun lokal memperoleh penghasilan dengan cara mengemis tentunya hal ini sangat mempengaruhi kenyamanan tatanan kehidupan masyarakat dan perilaku mengemis juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2016 yang membahas tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dengan ketentuan pidana yang diatur pada pasal 25 yaitu :

1. Setiap warga negara yang melanggar ketentuan pergelandangan dan/atau pengemisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)
2. Setiap warga negara yang melanggar ketentuan pergelandangan dan pengemisan secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lana 3 (tiga) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah)

Dalam hal ini, upaya pemerintah Dinas Sosial terhadap penanganan pengemis sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi rehabilitasi sosial anak dan lansia Bapak Ns. Wardiyan Syaputra, S.Kep :

> “Para pengemis di Kota Meulaboh sebagian besar bukanlah masyarakat Meulaboh asli jika di persentasekan 90% masyarakat dari Aceh Utara, Aceh

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Tengah, dan 10% nya lagi masyarakat asli Meulaboh. Faktor penyebab masyarakat mengemis dikarnakan faktor ekonomi, adanya dorongan dari orang-orang tertentu untuk ditugaskan untuk menggalang dana di Daerah lain, dan ketika ditanya surat tugasnyapun tidak ada, rata-rata yang di tangkap oleh Dinas Sosial merupakan Santri, tentunya hal ini sangatlah kita khawatirkan karena dapat menimbulakan kecelakaan serta terjadi hal-hal yang tidak diinginkan padahal, tugas santri itu belajar. Larangan untuk mengemispun telah dijelaskan pada qanun 5 tahun 2016, dalam ranah upaya Dinas Sosial dalam penanganan pengemispun yang pertama adanya perehabibiltasi serta melakukan pembinaan misalnya pemberitahuan atau sosialisasi adanya larangan mengemis serta pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai anak dan masyarakat, serta Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial terkait program-program yang dibuat di Daerahnya sehingga anggota penduduknya tidak melakukan pengemisan di Derah lain. Jika didapat pengemis asli anggota Aceh Barat ketika sudah ditelusuri maka akan di berikan pendampingan PKH atau PKSK dilakukan pengecekan dimana Gampong dan Kecamatan pengemis tersebut sehingga dapat dilihat pengemis tersebut masuk atau tidak didata PBKS dan diberikan bantuan kepada pengemis tersebut sehingga diharapkan pegemis tersebut tidak akan mengulangi perilaku mengemis. Dinas Sosial memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pengemis asli Aceh Barat ataupun bukan masyarakat asli, adapun hambatan yang di dalam upaya pananganan pengemis yakni belum ada rumah singgah atau tempat perehabilitasi untuk para pengemis dan seharusnya ketika ada rumah singgah untuk para pengemis agar dapat dibina dan di isolasi mandiri untuk diberikan bimbingan konseling yang bertujuan mengembalikan fungsi-fungsi sosial. Pemahaman kepada masyarakat terhadap larangan memberikan sejumlah uang, sosialisasi masih sangat kurang sehingga hanya sebagian masyarakat yang mengetahui larangan untuk memberikan sejumlah uang kepada pengemis, dan telah juga di buat poster/baliho terhadap larangan mengemis dan larangan untuk memberikan sejumlah uang namun masyarakat kurang memperhatikannya dan masih saja dapat kita lihat beberapa pengemis di titik-titik tertentu".

(Wawancara, 15 November 2021 Pukul 09:30 WIB)

Kegiatan mengemis tentunya banyak dijumpai di beberapa lokasi sehingga membutuhkan peran pemerintah dalam penanganannya sebagaimana tanggapan informan terkait upaya pemerintah terhadap penanganan pengemis yakni Bapak Edwin Radinal, S.Sos selaku Pelaksana Bidang Rehabilitasi Sosial :

> "Perilaku mengemis merupakan perilaku yang sangat dilarang karena dapat melanggar aturan atau qanun yang berlaku di Derah sehingga, hal ini menjadi perhatian dan permasalahan yang harus diatasi dengan maksimal, namun, hambatan yang dalam penanganan pengemis yakni adanya beberapa oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan atau mengkoordinir para pengemis sehingga mereka merasa aman, dan terlindungi untuk melakukan kegiatan mengemis, contohnya ada beberapa pengemis ketika di tanggap Satpol PP dan telah diserahkan di Dinas Sosial para pengemispun berusaha menghubungi orang tertentu untuk berusaha menjemputnya di Dinas Sosial bahkan, ditemui yang menjemput pengemis tersebut menggunakan mobil, tentunya hal ini menjadi kendala yang masih dicari siapa dalang dari kegiatan mengemis tersebut, Hambatan selanjutnya kurangnya infrastruktur untuk tempat perehabilitas para pengemis baik masyarakat Aceh Barat maupun Masyarakat luar. Tindakan yang dilakukan Dinas Sosial bagi pengemis luar hanya diberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan mengemis, kemudian diberikan pemahaman, dan dilakukan koordinasi dengan Dinas Sosial asal pengemis serta pengemis tersebut dipulangkan ke Daerah asalnya, para pengemis tersebar di beberapa titik misalnya terdapat di beberapa Wisma tertentu, serta daerah Ujung Baro".
> (Wawancara,15 November 2021 Pukul 10:00 WIB)

Dalam penertiban, serta penangkapan para pengemis merupakan tanggung jawab Satpol PP sebagaimana tanggapan informan yang bekerja di Satpol PP oleh Bapak M.Yuhti, SE selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Aceh Barat:

> "Tugas Satpol PP terhadap penanganan pengemis yakni melakukan penangkapan dan melakukan penertiban dibeberapa titik-titik pengemis, adapun tindakan yang dilakukan Satpol PP (Tatib) dalam menertipkan para pengemis yakni melakukan pengawasan dan penertiban atau patrolisetiap hari, ketika kedapatan para pengemis maka akan di identifikasi identitas oleh Satpol PP dan kemudian diserahkan ke Dinas Sosial untuk dapat dilakukan pembinaan. Adapun kategori dari pengemis seperti, pengemis, gelandangan, serta peminta-minta yang kerumah-rumah masyarakat tanpa surat izin atau surat resmi maka akan dilakukan penangkapan atau penertiban. Adapun awal munculnya pengemis pada tahun 2016 sesuai dengan ditetapkannya Qanun nomor 5 tahun 2016, total gelandangan dan pengemis yang terjaring razia dari bulan Januari-November tahun 2021

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

sebanyak 74 orang, jika pengemis ditangkap oleh Satpol PP berulang-ulang kali maka Satpol PP melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang tertera dalam Qanun nomor 5 tahun 2016 tersebut namun, sanksi ini belum diterapkan dengan optimal karena masih mengingat kemanusiaan dan kepedulian sesama manusia. Kegiatan mengemispun banyak dijumpai pada hari-hari besar misalnya hari Meugang, Lebaran maka pengemispun bermigrasi ke Daerah lain untuk mengemis, Satpol PP juga telah bekerjasama dengan pihak-pihak Gampong, Kecamatan, Kesehatan untuk menanggulangi terajdinya pengemis asli Aceh Barat. Adapun titik-titik tempat tinggal pengemis dapat berpindah-pindah dimana untuk menghindari penggerebekkan oleh pihak Satpol PP, lokasi pengemis dapat kita jumpai di Daerah Blang pulo, Lorong Manggis, daerah Pasar Ikan Meulaboh dan jalan Geurte.
(Wawancara, 15 November 2021 Pukul 11:00 WIB)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kenyataanya banyak masyarakat luar yang melakukan kegiatan mengemis di Kota Meulaboh dengan itu perilaku tersebut sangatlah mengganggu kenyamanan, keamanan dan merusak keindahan kota. Dengan demikian pemerintah memiliki peran penting untuk melakukan penanganan terhadap Gepeng (Gelandangan Pengemis), keberadaan pengemis tentunya juga dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berkendara sehingga tentunya hal ini, dapat menimbulkan rawan terjadinya kecelakan sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan penertiban.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satpol PP Kabupaten Aceh Barat maka diproleh jumlah pengemis mulai dari tahun 2019-2021 yang semakin meningkat di setiap tahunnya di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 4.3.1 Jumlah Pengemis

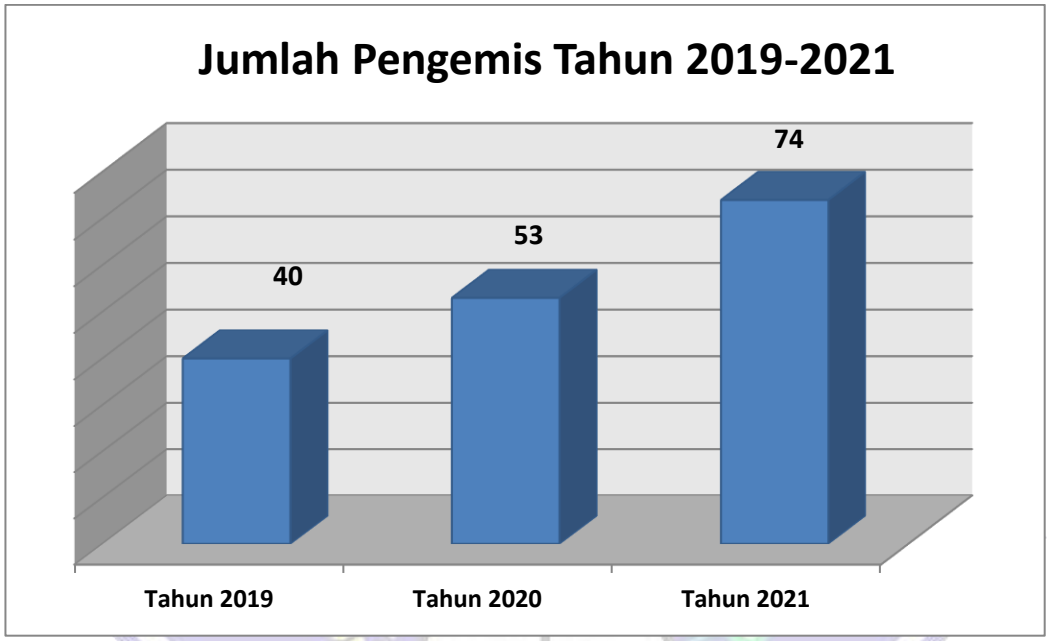

Sumber dari : Satpol PP Aceh Barat

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Tabel 4.3.2 Hasil Wawancara Informan

No	Nama (Keterangan)	Hasil Wawancara Informan
1	Ns.Wardiyan Syaputra, S.Kep (Kasi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lansia)	Peran Pemerintah Dinas Sosial dalam melakukan penanganan pengemis yaitu melakukan rehabilitasi, pembinaan, serta pemahaman kepada para pengemis untuk mengembalikan kembali fungsi-fungsi sosialnya. Pemerintah Dinas Sosial juga mengeluarkan surat pernyataan bagi para pengemis yang bukan berasal dari Daerah lain kemudian Dinas Sosial akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial daerah asal pengemis dan akan dikembalikan kedaerah asalnya. Jika di persentasekan pengemis 90% pengemis luar Aceh Barat dan 10% pengemis asli Aceh Barat
2	Edwin Radinal, S.Sos (Pelaksana Bidang Rehabilitasi Sosial)	Peran Dinas Sosial bekerja sama dengam Satpol PP dan WH untuk melakukan penertiban. Adapun hambatan yang dirasakan pemerintah dalam melakukan penangnan pengemis adanya beberapa oknum yang mengkoordinir para pengemis sehingga pengemis merasa aman dan terlindungi, Kurangnya saran da prasana atau rumah singgah bagi para pengemis sehingga sulit untuk memberikan pemahaman dan mengembalikan kembali fungsi-fungsi sosialnya. Keberadaan para pengemis juga dapat dijumpai di beberapa titik minsalnya di beberapa wisma daerah Ujung Baro, Meulaboh.
3	M. Yuthi, SE (Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Aceh Barat)	Upaya pemerintah khususnya Satpol PP melakukan pegawasan atau patrol, penertiban, penangkapan dan memperoleh identitas para pengemis ketidak didapati pengemis yang melakukan kegiatan mengemis di lingkungan masyarakat. Satpol PP bertugas untuk melakukan penangkapan dan kemudian ketika telah diperoleh identitas pengemis maka, pengemis tersebut akan diserahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan rehabilitasi. Adapun lokasi tempat tinggal pengemis di Jalan Manggis, Jalan Geureute, Ujung baro dan losmen-losmen daerah pajak ikan Meulaboh.

Sumber dari : Hasil wawancara bersama informan

Bagan 4.3.3Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Pengemis

Sumber dari : hasil wawancara bersama informan

Berdasarkan bagan di atas maka dapat kita ketahui dan sesuaikan dengan apa yang telah dijelasakan oleh informan langsung kepada peneliti yang menyampaikan bahwa, upaya pemerintah dalam penanggulangan pengemis ada beberapa aspek yakni, adanya pembinaan, sosialisasi, perehabilitasi, bimbingan psikilogi untuk memperbaiki fungsi-fungsi sosial, pemberian dana untuk memperoleh suatu usaha yang berkelanjutan, serta adanya koordinasi dengan Dinas Sosial di Daerah yang lain. Kemudian dengan adanya upaya ini pemerintah Dinas Sosial bekerjasama dengan Satpol PP diharapkan mampu mengurangi angka pengemis di setiap tahunnya, tentunya semakin banyak pengemis di Kota Meulaboh maka akan menimbulkan adanya ketidakmampuan pemerintah untuk menanggulangi, membina serta mensejahtrakan masyarakatnya dengan optimal. Pemerintah Aceh Barat khususnya Dinas Sosial bersama Satpol PP menetapkan Qanun 5 tahun 2016 sebagia upaya penindakan yang tegas.

BAB V

PEMBAHASAN PENELITIAN

5.1 Pandangan Masyarakat Terhadap Perilaku Mengemis Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

Fenomenologi terhadap perilaku mengemis oleh masyarakat Kota Meulaboh dipandang sebagai interaksi antara masyarakat dan pengemis yang kerap terjadi di tempat-tempat umum seperti pasar maupun tempat perbelanjaan umum lainnya. Dimana saat ada pengemis yang menghampiri masyarakat, bukanlah menjadi hal baru tetapi masyarakat menganggap hal tersebut sebagai interaksi yang wajar karena sudah sering didapati pengemis meminta-minta di tempat umum.

Pandangan masyarakat terhadap pengemis tentunya berbeda-beda, sebagian masyarakat menganggap kegiatan mengemis hal yang wajar, serta tidak mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat, dan sebagian masyarakatpun merasa keberadaan pengemis ini sangat mengganggu keteraturan tetanan kehidupan masyarakat sehingga keberadaan pengemis ini masih membutuhkan peran pemerintah dalam penangananya.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Pandangan masyarakat terhadap keradaan pengemis tentunya, hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal yakni, faktor pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga, mendorong mereka untuk berusaha memperoleh pendapatan dari mengemis, faktor rendahnya tingkat pendidikan, faktor penghasilan, faktor ketergantungan untuk menjadi pengemis, faktor kebiasaan, dan selanjutnya faktor lingkungan. Dalam hal ini, pandangan masyarakat terhadap kegiatan mengemis menjadi hal yang sudah terbiasa dengan hadirnya pengemis karna, masyarakat masih mementingkan kemanusiaan serta berusaha membantu sesama. Keberadaan

pegemis tentunya tidak sepenuhnya *real* pengemis bahkan juga di jumpai beberapa masyarat biasanya masyarakat dari Daerah lain untuk menjadi pengemis dengan kondisi fisik yang normal namun berpura-pura tidak normal demi memperoleh belaskasihan orang lain.

Berikut pandangan masyarakat terhadap perilaku mengemis tentunya berbeda-beda, karena masyarakat pun dalam membantu orang lain tentunya memilih dan memilah karnaada beberapa oknum-oknum yang berusaha memanfaatkan belaskasihan orang lain demi keuntungan individu, sehingga dalam hal inipun diperlukan kerjasama seluruh lapisan masyarakat baik itu masyarakat, maupun pemerintahnya untuk melakukan penanggulangan dalam mengurangi angka pengemis. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam mengurangi angka pengemis yakni, melakukan pencegahan terjadinya kegiatan pengemisan, melaporkan jika ada kegiatan mengemis secara berkelompok, melakukan dukungan terhadap penanganan pengemisan serta mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pengemisan.

Kehadiran pengemis yang sudah sering dijumpai dan ditemukan pada tempat-tempat umum di Kota Meulaboh menjadi fenomena yang sudah wajar bagi masyarakat. Hal ini muncul atas tafsir dari masyarakat yang memperjelas eksistensi pengemis di tengah-tengah masyarakat.Namun begitu, keberadaan pengemis tersebut pada akhirnya juga memberikan dampak dan pengaruh yang *negative* terhadap kehidupan sosial pada masyarakat Kota Meulaboh.

Dampak fenomena pengemis di Kota Meulaboh terhadap kehidupan sosial masyarakat kota Meulaboh adalah mempengaruhi tatanan sosial yang melibatkan keyakinan pada prinsip nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Dimana,

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

dengan segala cara pengemis untuk menarik perhatian dan iba dari masyarakat seringkali menggunakan segala cara seperti berpura-pura cacat, membawa anak kecil agar diberikan sumbangan oleh masyarakat tentunya akan menjelma sebagai penyakit sosial apabial terus dibiarkan.

Berdasarkan konsep fenomenologi, keberadaan pengemis di Kota Meulaboh termasuk ke dalam fenomenologi eksistensial berorientasi pada pengemis dan kebiasaannya yang menyebabkan perubahan tatanan nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat Kota Meulaboh. Hal ini menjadi kenyataan yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa upaya penindakan yang tegas maka keberadaan pengemis di Kota Meulaboh dapat menjadi ancaman karena pengemis memiliki motif mendapatkan uang atau rasa kasihan dengan mengorbankan orang lain dan tidak jujur.

5.2 Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Pengemis Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti langsung pada dasarnya pemerintah Aceh Barat khususnya Dinas Sosial telah melakukan beberapa penanganan dan upaya untuk mengurangi angka pengemis sebagaimana Dinas Sosial juga telah bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) bersama juga pemerintah Aceh Barat telah menetapkan beberapa beberapa aturan yang telah ditetapkan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan pengemis namun masih terdapat kendala atau hambatan dalam penanganan GePeng (Gelandangan Pengemis) sehingga fenomena mengemis masih dapat kita jumpai

dibeberapa titik sudut Kota Meulaboh, adapun hambatan atau kendala yang dirasakan oleh pemerintah khususnya Dinas Sosial dan Satpol PP yaitu;

1. Adanya beberapa oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan atau mengkoordinir para pengemis, hal ini menyebabkan keberadaan pengemis di Kota Meulaboh menjadi sulit untuk ditangani.
2. Adanya dorongan atau paksaan dari orang-orang tertentu yang menggunakan dan memanfaatkan keadaan dari pengemis untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya dan sering diikuti dengan adanya ancaman.
3. Kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana untuk tempat perehabilitas atau penampungan GePeng (Gelandangan Pengemis), belum maksimalnya ketersediaan fasilitas menajdi hambatan dalam upaya untuk mengatasi pengemis. Namun begitu, upaya untuk merehabilitasi pengemis pada tempat yang minim fasilitas terus dilakukan oleh pemerintah Kota Meulaboh.
4. Belum ditegakkannya ketentuan pidana atau sanksi tegas kepada para pengemis dan gelandangan karena masih mempertimbangkan kemanusiaan. Hukum yang belum memadai tentunya akan meminimalisir efek jera kepada para pengemis.
5. Kurangnya kesadaran dan pemahaman para pengemis atas larangan untuk mengemis, namun upaya dari pemerintah Kota Meulaboh terus dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada para pengemis yang ada.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Berdasarkan aturan atau Qanun yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berdasarkan jawaban dari beberapa informan maka dalam upaya penanganan pengemis di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, membutuhkan kerjasama seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengurangi angka pengemis.

Berdasarkan jawaban dari beberapa informan maka diperoleh informasi sehingga dapat disimpulkan bahwa fenomena pengemis terhadap kehidupan sosial masyarakat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat diakibatkan karena beberapa faktor internal dan eksternal adapun faktor internalnya yakni :

1. Adanya sifat malas untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan atau kemampuan individu
2. Kurangnya kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau *skill*, sehingga dalam memperoleh penghasilan masyarakat, untuk memperoleh pekerjaan peluang pekerjaan yang sesuai tidak didapatkan..
3. Rendahnya tingkat pendidikan, faktor ini menjadi hal yang paling berpengaruh terhadap masyarakat dalam mendapatkan atau untuk berusaha mendapatkan pekerjaan
4. Munculnya sifat mudah menyerah, hal ini disebabkan masyarakat tidak mau berusaha lebih untuk memperoleh suatu tujuan yang ingin dicapai sehingga, masyarakat lebih memilih melakukan hal-hal yang dianggap mudah tanpa harus bekerja.
5. Sudah menjadi Kebiasaan, hal ini tentunya menjadi faktor yang sangat berpengaruh dikarnakan masyarakat sudah merasa nyaman dan terbiasa dengan suatu kegiatan yang dianggap lebih menguntungkan serta lebih

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

mudah dalam memperoh pengahasilan tanpa haru bekerja keras untuk memperoleh suatu apa yang mereka inginkan dan butuhkan.

Faktor eksternal yaitu :

1. Adanya pengaruh lingkungan, dimana faktor ini menjadi hal yang sulit untuk dihilangkan karena sudah sejak kecil masyarakat hidup dalam lingkungan yang kurang baik sehingga, hal ini menimbulkan pengaruh seseorang dalam melakukan suatu kegiatan.
2. Adanya dorongan dari keluarga, faktor menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap suatu kegiatan dalam masyarakat, keluarga merupakan peran terpenting bagi berkembangnya seorang individu.
3. Adanya paksaan dari orang lain, faktor ini sangat berpengaruh dikarenakan adanya tuntutan atau paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu perkerjaan atau kegiatan.
4. Adanya ajakan dari orang lain, Tentunya faktor inipun menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang atau individu.

Kegiatan mengemis ini dapat kita jumpai pada hari-hari besar sehingga, dibutuhkan peran pemerintah khususnya Dinas Sosial dan Satpol PP untuk berusaha melakukan penanganan terhadap para pengemis di Kota Meulaboh.Pemerintah juga harus bekerjasama dengan masyarakat, Gampong, Kecamatan, untuk mengatasi atau megurangi angka pengemis.Dalam Fenomena juga dapat diartikan sebagai suatu pengalaman penampakan individu atau masyarakat terhadap suatu permasalahan atau gejala sosial yang dapat di lihat secara langsung di lingkungan masyarakat. Fenomena dapat juga diartikan sebagai suatu permasalahan terhadap seperangkat fakta sosial yang dapat dilihat secara objektif, dapat melihat,

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

memahami suatu kejadian tersebut berdasarkan pemahaman dari sisi lain suatu permasalahan atau gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Adapun fenomena pengemis yang terjadi khususnya di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat yaitu :

1. Fenomena pengemis yang berada pada tempat-tempat perbelanjaan, fenomena ini tentunya merupakan suatu permasalahan atau nomena yang kerap terjadi intraksi antara masyarakat dan pengemis pada tempat-tempat perbelanjaan.
2. Fenomena pengemis yang berpura-pura menjadi pengemis, fenomena ini tentunya menjadi hal yang kerap terjadi yang disebabkan oleh oknum tertentu untuk memperoleh kentungan pribadinya. Sehingga berusaha untuk memanipulasi dan memperoleh serta memanfaatkan kebaikan masyarakat demi keuntungannya sendiri.
3. Fenomena pengemis dari daerah lain, fenomena ini tentunya kerap di jumpai oleh pemerintah mendapatkan pengemis yang berada di Kota Meulaboh 90% merupakan masyarakat luar dan 10% masyarakat asli Aceh Barat.
4. Fenomena pengemis yang memanfaatkan anak-anaknya untuk melakukan kegiatan mengemis, fenomena ini tentunya sangat disayangkan

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pandangan masyarakat terhadap perilaku mengemis bahwa : pertama, keberadaan pengemis bagi sebagian masyarakat tidakmengganggu, dikarenakan masih mementingkan rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan bantuan atau uluran tangan masyarakat yang lainnya namun, masyarakat merasa terganggu dengan kehadiran pengemis yang berpura-pura menjadi pengemis untuk memperoleh belaskasihan orang lain dan memperoleh keuntungannya sendiri. Kedua, kegiatan mengemis dapat ditemui dibeberapa titik atau tempat perbelanjaan sebagian pengemis banyak yang memanfaatkan anaknya untuk memperoleh belaskasihan dari masyarakat. Ketiga, faktor yang mempengaruhi kegiatan mengemis yaitu, faktor usia, rendahnya tingkat pendidikan, faktor kebiasaan, dan faktor kondisi fisik yang tidak mendukung untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kondisi seorang individu atau masyarakat. Keempat, fenomenologi terhadap perilaku mengemis oleh masyarakat di Kota Meulaboh dipandang sebagai suatu interaksi antara masyarakat dan pengemis yang kerap terjadi di tempat-tempat perbelanjaan.
2. Upaya pemerintah dalam penanganan pengemis yaitu : Pertama, pemerintah khususnya Dinas Sosial yang bertanggung jawab dalam penanganan pengemis bekerjasama dengan Satpol PP dan WH untuk melakukan

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

penanganan pengemis khusunya di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Kedua, Pemerintah juga telah menetapkan Qanun Nomor 5 tahun 2016 tentang Penangggulangan GePeng (Gelandangan Pengemis) sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikankenyamanan dan keamanan serta kesejahtraan terhadap masyarakatnya. Ketiga, upaya pemerintah dalam penanganan pengemis yaitu memberikan rehabilitiasi, pembinaan, pemahaman untuk mengembalikan fungsi-fungsi sosialnya. Keempat, Adapun hambatan yang dirasakan pemerintah dalam penanganan pengemis yaitu, adanya oknum tertentu yang mengkoordinir para pengemis, adanya dorongan atau paksaan untuk melakukan kegiatan mengemis, kurang memadainya sarana dan prasarana untuk tempat rumah rehabilitasi para pengemis, belum tegaknya aturan atau sanksi yang berlaku karena masih mementingkan rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama, kurangnya kesadaran untuk tidak melakukan kegiatan mengemis.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti memberikan saran dalam beberapa aspek yakni;

1. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat untuk dapat memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat agar menyalurkan sumbangannya kelembaga resmi agar tidak memberikan peluang bagi peningkatan jumlah pengemis di Kota Meulaboh.
2. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan syiarnya dalam hal membangun muslim yang tangguh sebagaimana hadist Rasulullah "Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah.
3. Masyarakat agar lebih menyalurkan penyaluran sedakah atau sumbangan serta zakat melalui lembaga resmi seperti di lembaga sosial di Kabupaten Aceh Barat.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DAFTAR PUSTAKA

Aji Kusuma Aria, (2017).*Sikap Dengan Perilaku Masyarakat Tentang Pertolongan Pertama Korban Kecelakaan Lalu Lintas.*Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jombang

Alfaqinisa Rara, (2015). *Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Sikap Dan Perilaku Orang Tua Tentang Pneumonia Dengan Tingkat Kekabuhan Pneumonia Pada Balita Wilayah Puskesmas Ngesrep Kota Semarang. Tahun 2011.*Skripsi Universitas Negeri Semarang

Anggriana Martika Tiyas, Dewi Kartika Noviyanti, (2016).*Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis.*Volume 7.Nomor 1.Oktober 2016

Damayanti Febrina, (2016).*Kondisi Sosial Ekonomi Pengemis Dalam Perspektif Teori Darmaturgi (Studi Kasus Di Desa Pangeralang, Kecamatan Kamranjen, Kabupaten Banyumas.* Skripsi Universitas Semarang

Feberiyanto Bagus Aminudin Mukhammad, (2016).*Hubungan Anatar Pengetahuan Dan Sikap Dengan Perilaku Konsumsi Jajan Sehat Di Mi Selamaniyah Mojoangung Jombang.*Skripsi Universitas Airlangga

Fadillah Ade, (2017).*Fenomena Pengemis Di Kota Langsa (Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis)*.Volume 2.Nomor 2.Oktober 2017

Febriken Terry Adrianus, Rochaeti Nur, Astute sri Endah, (2016).*Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Semarang.*Volume 5.Nomor 4. Tahun 2016

Huda Miftahul, (2009).*Implementasi Prinsip Nilai Dan Etika Pekerja Sosial Dalam Penanganan Pengemis Di IPMS Yogyakarta*.Volume 1.Number 1.June 2019. P.63-78

Husein Saddam, (2016).*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hadirnya Pengemis Di Sekitar Mesjid Raya Al-Matsum Kota Medan.* Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Indraswari, (2009).*Perempuan Dan Kemiskinan.*Volume 14.Nomor 2. September 2009

Iskandar Malik Abdul, (2021).*Praktik Sosial Pengemis Perkotaan*.Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani

Khakim Mufti, Ajib Purnomo Egi, (2021). *Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Daerah Istimewa Yogyakarta.*Volume 4.Nomor 1. Tahun 20021

Muawanah Bagja Siti, (2017). *Jalan Sukses Dari Allah.* Jakarta: Kompas Gamedia Building

Muslimin Azis Abdul, (2015).*Perilaku Sosial Pengemis Di Kota Makassar.*Skripsi Universitas Negeri Makassar

Nurmasari Aprilia, (2021). *Kehidupan Sosial Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dilihat dari Perspektif Pendidikan Agama Islam Di Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan.*Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang

Pentury Santi Yulita, Bua Arrang Yuusdam, (2017).*Perbandingan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Bekerja Pada sector Formal Masyarakat Yang Bekerja Pada Sektor Informa.*Volume 1.Nomor 2.Oktober 2017

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

Setiawan Hendy, 2020).*Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban Dan Rural Di Daerah Istimewa Yogyakarta.*Volume 6, Nomor, Mei 2020

Sore B.Uddin, Sobirin, (2017).*Kebijakan Publik.*Makassar:Setara Press

Sugiyono, (2018).*Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif Dan R&D.*Bandung: Afabeta

Sulistyorini Ari, (2020).*Fenomena Gelandangan pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban Dan Rural Di Daerah Istimewa Yogyakarta.*Volume 2.Nomr 1. Juni 2020

Ulfi, Rahmi, (2018).*Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Pengemis Dan Penanggulangan Di Kota Banda Aceh.*Volume 2.Nomor 2.Oktober 2018

Wirawan, (2012).*Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma(Fakta sosial, Definisi sosial dan Perilaku Sosial),* Jakarta:Kencana Prena Media

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

1. Masyarakat :
    1. Bagaimana pandangan anda terhadap keberadaan perilaku mengemis?
    2. Apakah dampak buruk menurut anda dengan hadirnya kegiatan mengemis?
    3. Apakah keberadaan pengemis mengganggu kenyamanan atau aktivitas masyarakat ?
    4. Sejauh ini apa ada tindakan pemerintah terhadap penanganan pengemis ?

2. Dinas Sosial :
    1. Bagaimana upaya pemerintah terhadap penanganan pengemis ?
    2. Dari tahun berapa adanya pengemis di kota Meulaboh ?
    3. Apa dampak bagi masyarakat terhadap keberadaan pengemis ?
    4. Apakah pengemis di Kota Meulaboh asli warga Aceh Barat ?
    5. Upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam penanganan pengemis?
    6. Apa hambatan atau kendala dalam upaya penanganan pengemis ?
    7. Adakah Qanun Aceh Barat yang mengatur pengemis ?
    8. Apakah ada peningkatan jumlah pengemis setiap tahunnya ?
    9. Adakah larangan untuk memberikan uang kepada pengemis ?
    10. Adakah pengawasan yang dilakukan untuk melihar keberadaan pengemis?
    11 Adakah program khusu terhadap pencegahan pengemis ?
    12. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap penanganan pengemis ?
    13. Yang dikategorikan pengemis itu seperti apa ?
    14. Adakah sosialisasi yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Sosial kepada masyarakat terhadap larangan pengemis ?

3. SatPol PP :
    1. Apakah tindakan yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban pengemis ?
    2. Yang dikategorikan pengemis seperti apa ?
    3. Adakah jadwal tertentu dalam melakukan penertiban terhadap pengemis ?
    4. Unsur apa saja yang tergabung dalam penanganan pengemis ?
    5. Apakah keberadaan pengemis menjadi permasalahan atau tidak ?

4. Pengemis :
    1. Mengapa bapak/ibu memilih menjadi pengemis ?
    2. Sudah berapa lama menjadi pengemis ?
    3. Berapa pendapatan setiap harinya ?
    4. Pendapatan dari mengemis di pergunakan untuk apa saja ?
    5. Dimana saja melakukan kegiatan pengemisan ?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Wawancara bersama Bapak Ns. Wardiyan Syaputra S. Kep

Wawancara dengan Bapak Edwin Radinal S. Sos

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Wawancara dengan Bapak M. Yuthi SE

Wawancara dengan Kak Lela

Wawancara dengan Ibu Amelia

Wawancara dengan Bapak Ahmad

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Wawancara dengan Bapak Ali

Wawancara dengan Bapak Khadir

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 1510/UN59.5/PT.01.05/2021 05 November 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data Untuk Skripsi**

Yth;

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat

Di

Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data skunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasisawa/i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin. Adapun mahasiswa/i yang melakukan penelitian adalah :

Nama	: Sela Afrika Diana
NIM	: 1805905020015
Jurusan	: Sosiologi
No. HP	: 082276290812
Dosen Pembimbing	: Adam Sani, M.H

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wakil Dekan I

Dr. Agusni Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan:
- Mahasiswa
- Arsip

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 1510/UN59.5/PT.01.05/2021 05 November 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Dan Wilayatul Hisbah (WH), Kab. Aceh Barat
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama	: Sela Afrika Diana
NIM	: 1805905020015
Jurusan	: Sosiologi
No. Hp	: 082276290812
Dosen Pembimbing	: Adam Sani, M.H

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Wakil Dekan I

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan:
- Mahasiswa
- Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DINAS SOSIAL

Jalan Abadi Gampong Rundeng No 43 Telp. (0655) 7551706
Email: dinsos.acehbarat@gmail.com

MEULABOH

Meulaboh, 18 Januari 2022

Nomor : 460/ 127 /I/ 2022

Lampiran : -

Perihal : **Surat Balasan Penelitian wawancara dan Pengambilan Data An.Sela Afrika Diana**

Yth,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Teuku Umar
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sebungan dengan surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar Nomor : 1510/UN59.5/PT.01.05/2021 Tanggal 05 November 2021 Perihal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi atas nama Mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: Sela Afrika Diana
NIM	: 180559056020015
Jurusan	: Sosisologi
Dosen Pembimbing	: Adam Sani, M.H

Dengan ini menyatakan bahwasannya Mahasiswa yang tersebut namanya diatas telah selesai melakukan Wawancara Penelitian dan Pengumpulan Data untuk Penyusunan Karya Ilmia Skripsi pada Bidang Rehabalitasi Sosial (Rehsos) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat selama 5 (Lima) hari dari tanggal 10 s/d 15 November 2021.

Demikian surat balasan ini kami keluarkan untuk dipergunakan sebagaimana keperluanya dan atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ACEH BARAT
SEKRETARIS

GUT ADIH RIRI MEUTIA, BA
Pembina Tk. I
NIP.19660223 198603 2 003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
Jalan Gajah Mada (Komplek Kantor Bupati Aceh Barat) Telp/Fax (0655) 7553222
MEULABOH

SURAT KETERANGAN
Nomor: 331.1/ 13 /2022

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menerangkan bahwa :

Nama	:	Sela Afrika Diana
Pekerjaan	:	Mahasiswi
NIM	:	1805905020015
Semester	:	VII (tujuh)
Prodi/Konsentrasi	:	Sosiologi - FISIP
Perguruan Tinggi	:	Universitas Teuku Umar
No. HP	:	0822 7629 0812
Dosen Pembimbing	:	Adam Sani, M. H
Alamat	:	Desa Kuta Padang, Kec. Simeulue Cut Kab. Simeulue

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian Skripsi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat.

Demikian Surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 17 Januari 2022

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH BARAT,

SATPOL PP WH

Dodi Bima Sapura, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 19830513 200112 1 002

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 161/UN59.5/HK.02/2021
TENTANG
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA Sela Afrika Diana NIM 1805905020015
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentng Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA Sela Afrika Diana NIM 1805905020015 PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

CS Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

KESATU	:	Menunjuk ADAM SANI, MH sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Sela Afrika Diana NIM 1805905020015 Program Studi SOSIOLOGI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
KEDUA	:	Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
KETIGA	:	Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
KEEMPAT	:	Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 23 Agustus 2021
a.n REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,

Basri, SH.MH
NIP 196307131991021002

Tembusan :
1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip

CS Dipindai dengan CamScanner